

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
ANTARA PERUSAHAAN DENGAN DRIVER BERBASIS
ONLINE**

(Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ARDIANSYAH ARISTAMA

NPM : 1421030223

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN DENGAN DRIVER BERBASIS ONLINE (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)

Oleh:

Ardiansyah Aristama

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak pebisnis yang memanfaatkan peluang ini untuk menjalankan usahanya. Seperti halnya Go-jek, yang menerapkan sistem layanan ojek dengan pemesanan secara online. Go-jek menerapkan sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver Go-Jek. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian di dalam usaha, dimana diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan dan kerugian yang akan didapat antara kedua belah pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-jek shelter Kemiling Bandar Lampung dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek shelter Kemiling Bandar Lampung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek shelter Kemiling Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek shelter Kemiling Bandar Lampung.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan interview dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi secara umum. Populasi dalam skripsi ini ialah berjumlah 130, dimana jumlah sampel yang diambil ialah 13 orang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Sistem bagi hasil antara perusahaan dan driver Go-Jek adalah 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver menerima bagian 80%. Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver adalah bagi hasil dalam hal keuntungan saja. Sementara jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sendiri oleh driver dan tidak ada pertanggung jawaban dari perusahaan. Praktik sebagaimana disebut di atas, belum sesuai dengan hukum Islam, khususnya yang terkait dalam syarat-syarat akad *syirkah*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Lethkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ardiansyah Aristama
NPM : 1421030223
Program Studi : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi pada Go- Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
NIP:195904161987031002

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I
NIP:197807252009121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Dr. H.A Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)** disusun oleh **Ardiansyah Aristama, NPM. 1421030223**, Program Studi: Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS, M. Sos.I. (.....)
Sekertaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)
Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)
Penguji II : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

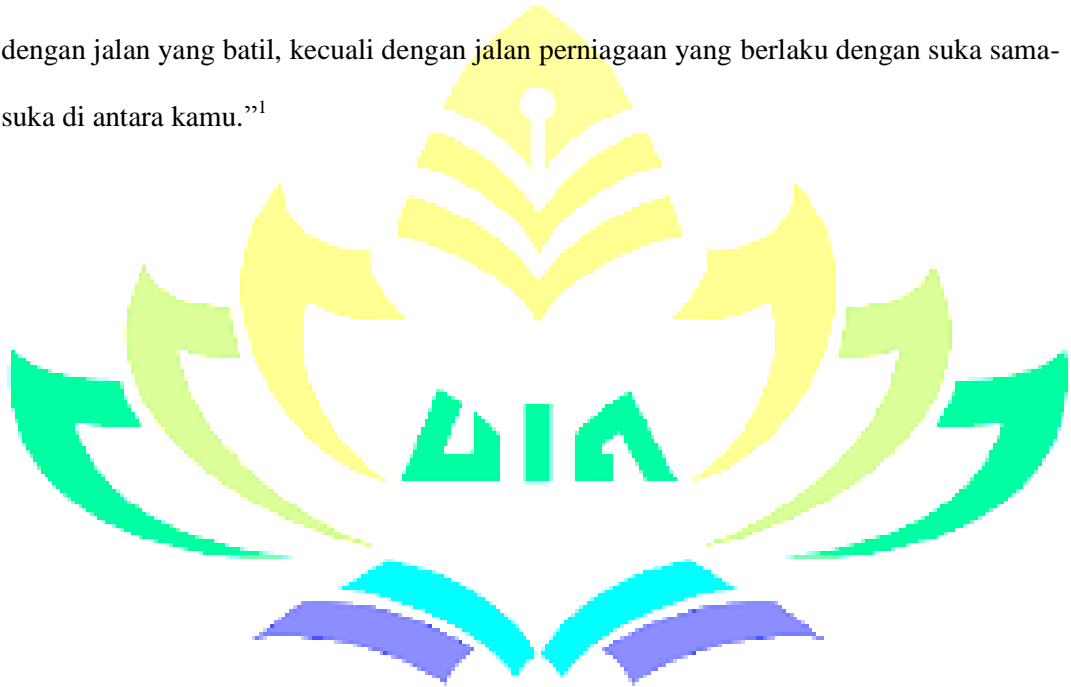


Dr. Mamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹

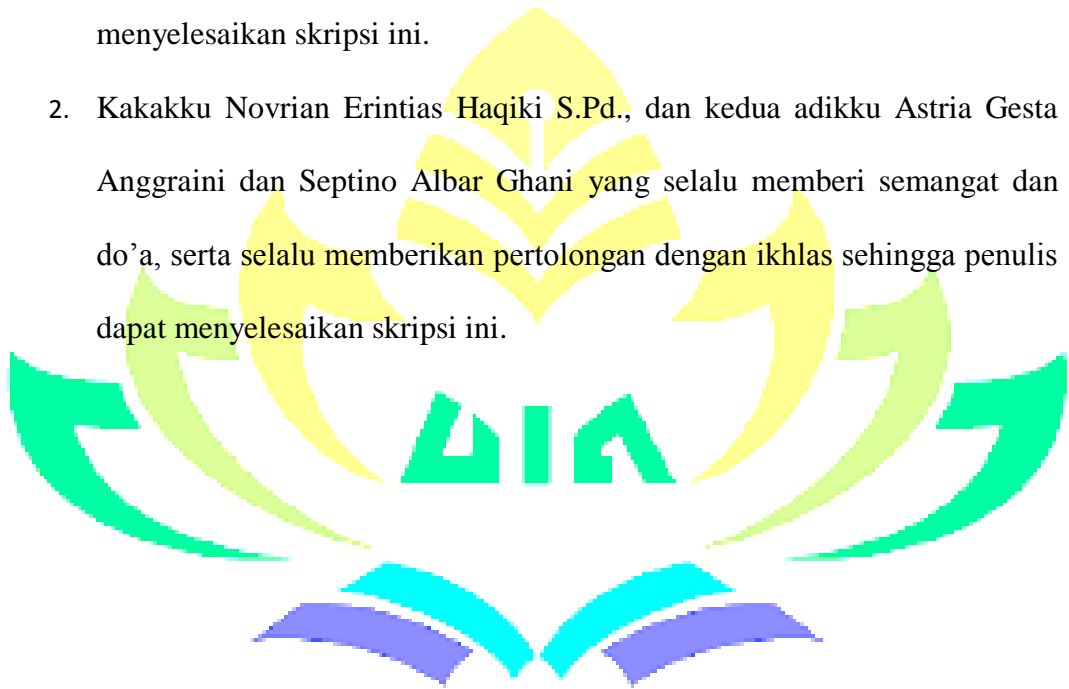


¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 80.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku Bapak Yahno Saring dan Ibu Werdayanti yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan kasih sayang beliau, serta dukungan moral, spiritual dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Novrian Erintias Haqiki S.Pd., dan kedua adikku Astria Gesta Anggraini dan Septino Albar Ghani yang selalu memberi semangat dan do'a, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Ardiansyah Aristama lahir pada tanggal 20 Agustus 1995 Bandar Lampung Kec. Tanjung Karang Barat, anak ke dua dari empat bersaudara, buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Yahno Saring dan Ibu Werdayanti.

Menempuh pendidikan dimulai dari :

1. Pendidikan Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedong Air selesai pada tahun 2007.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 10 Bandar Lampung selesai pada tahun 2010.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMA Perintis 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2014 meneruskan jenjang pendidikan strata satu di IAIN Raden Intan Lampung dan sekarang sudah menjadi UIN Fakultas Syari'ah pada jurusan Mu'amalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam kehidupan ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir jaman, amin.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah di UIN Raden Intan Lampung, dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, motivasi bimbingan dan doa dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. H. A. Khumaedi Ja'far, S.Ag.,M.H., selaku ketua jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak motivasi kepada mahasiswa;
4. Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. selaku pembimbing I, dan Khoiruddin., M.S.I. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pemikiranya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus UIN Raden Intan Lampung;

6. Kedua orang tua (Bapak Yahno Saring dan Ibu Werdayanti), kakak (Novrian Erintias Haqiki), adik (Astria Gesta Anggraini), adik (Septino Albar Ghani) serta keluarga yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebagaimana telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat melalui studinya hingga saat ini;
7. Rekan-rekan Muamalah A T.A 2014 yang senantiasa mendukung penulisan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan sehingga penulis menjadi sarjana hukum, Igam Restu, Ibnu Mas'ud, Arman Saibani, M.Budia Pratama, Ahmad Alifuddin, Hardi, Rohim, Nazela Rifdasani, Luxe Herlianti, Rafiq Rohmawati, dan tidak lupa Titin Satria yang telah menasehati dan selalu memberikan semangat dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan waktu yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2018

Penulis,

Ardiansyah Aristama
NPM: 1421030223

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	vii
.....	vii
i	
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bagi Hasil Dalam Hukum Islam.....	16
1. Pengertian Bagi Hasil	16
2. Macam-Macam Bagi Hasil	20
3. Berakhirnya Akad Bagi Hasil.....	58
B. Sistem Pembagian Keuntungan dan Kerugian Bagi Hasil Dalam Hukum Islam	62
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil Perusahaan Go-Jek.....	64
1. Sejarah Berdirinya Go-Jek.....	64
2. Visi dan Misi Go-Jek.....	66

3. Struktur Organisasi	67
4. Layanan Go-Jek.....	71
5. Syarat Pendaftaran Driver Go-Jek.....	74
6. Mekanisme Kerja Go-Jek	76
7. Kontrak Kerjasama Go-Jek	78
B. Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan dengan Driver di Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung	98

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan dengan Driver.....	103
B. Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan dengan Driver di Gojek Shelter Kemiling Bandar Lampung	10

BAB V PENTUP

A. Kesimpulan	11
B. Saran-Saran	11

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online” (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung), adapun istilah yang akan dijelaskan ialah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²
2. **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Hukum Islam juga bermakna sekumpulan aturan yang bersumber pada nash (Al-Qur'an dan

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 132.

Hadis) dan juga ijtihad dari para Mujtahid.³ Maksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan sistem ekonomi, seperti jual beli, bagi hasil, hutang piutang, perserikatan, sewa menyewa berdasarkan Al-Quran dan Hadist serta Ijtihad para ulama.

3. **Bagi Hasil** adalah bentuk dari perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, untuk salah seorang (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang atau modal kepada pihak lainnya untuk di perdagangkan (jual beli), dimana pihak-pihak tersebut akan terikat kontrak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.⁴

4. **Perusahaan** adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan disini yang di maksud ialah perusahaan Go-Jek atau yang lebih di kenal dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.⁵

5. **Driver** adalah orang yang menjalankan kegiatan (layanan) perusahaan sebagai mitra, melalui aplikasi yang di sediakan oleh perusahaan.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk meninjau atau menyelidiki sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online, yang kemudian

³ Daud muhammad, *Hukum Islam*, (Surakarta:Gramedia, 2001), h. 5.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid, 13, Alih Bahasa, Kamaludin A. Marzuki, (Semarang: Al-ma'arif, 1970, h. 36.

⁵ Wikipedia, Pengertian perusahaan Go-Jek.

⁶ Wikipedia, pengertian driver.

akan dilihat sistem pembagian keuntungannya yaitu menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan pandangan hukum Islam atau tidak.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, dan yang lagi marak saat ini yaitu Go-Jek, yang menerapkan sistem bagi hasil antara driver dengan perusahaan Go-Jek. Dengan pembagian sistem bagi hasilnya yaitu 80%-20%, tetapi modal yang diberikan perusahaan kepada driver berupa aplikasi semata. Sedangkan modal driver-driver tidak dinilai berupa nominal modalnya. Inilah yang menjadi alasan untuk meneliti tentang model ini.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, di muka bumi ini tidak dapat melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhan nya tersebut manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, karena tidak seorang pun manusia mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga manusia butuh kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama (hubungan kerja) ini sudah ada sejak adanya manusia di dunia ini dan berlangsung serta berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat pesat, tidak dapat dipisahkan dari adanya kerjasama dan hubungan kerja antar sesama manusia.

Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, sebagai berikut :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

Artinya : ...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya...”⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami secara global bahwa Allah SWT, memerintahkan manusia untuk tolong menolong dalam berusaha dan bekerja baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Dan memerintahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak benar yang menimbulkan dosa bagi dirinya sendiri.

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik pada level nasional maupun level Internasional. Hal ini

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), h.106.

dikarenakan dunia bisnis merupakan elemen yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian di suatu negara.⁸

Aktivitas bisnis diperlukan oleh setiap manusia karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu harus adanya suatu imbal hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai upah atas apa yang ia kerjakan.⁹ seperti yang tercantum dalam QS. Yusuf ayat 72 yang berbunyi, sebagai berikut :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".¹⁰

Setiap kontrak (perjanjian) kerja, hendaklah ditetapkan jenis pekerjaannya, dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang di luar kapasitasnya.

Allah SWT berfirman dalam QS. AL-Baqarah ayat 286, sebagai berikut :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 314.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 244.

hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."¹¹

Dalam membentuk usaha yang riil tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Akad Muamalah merupakan akad mitra-janji bukan antara dua lawan janji. Tidak di benarkan dalam hubungan Muamalah terjadi keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidak di benarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lain nya.¹²

Seperti dalam firman Allah SWT QS. Shad ayat 24, sebagai berikut :

....وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ....

Artinya : “....Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini....”¹³

Pada akad muamalah yang mengambil hubungan kemitraan seperti mudharabah atau musyarakah, semua pihak memikul resiko. Tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani suatu kewajiban untuk memikul resiko dalam kemitraan menurut prinsip syariah. Dalam mudharabah, sekalipun beban risikonya berbeda, tetapi baik shahib al-mal maupun mudharib sama-sama

¹¹ *Ibid.*, h. 49.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 135.

¹³ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 454.

memikul resiko. Perbedaannya disini ialah perusahaan memikul resiko kehilangan modalnya, sedangkan driver memikul resiko kehilangan tenaga, pikiran, dan waktunya selama driver menjalankan proyek yang di biayai oleh perusahaan Go-Jek.¹⁴

Perusahaan Go-Jek adalah salah satu bentuk usaha mandiri kreatif dimana dalam pemberian upah kepada driver Go-Jek menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh driver Go-Jek. Perjanjian bagi hasil antara Perusahaan Go-Jek dengan para driver di mulai ketika driver mendaftarkan diri sebagai mitra Go-Jek dan menjalankan layanan yang sudah di tetapkan oleh perusahaan Go-Jek. Dan berarti perusahaan dan driver harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini bisa berjalan tentu tidak akan terlepas dari suatu akad atau kontrak kerja antara perusahaan Go-Jek dengan driver Go-Jek yang telah disepakati bersama.

Perusahaan Go-Jek melakukan akad kepada setiap mitranya, dalam hal ini adalah driver Go-Jek. Para ahli hukum Islam memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁵

Hal inilah yang menjadi permasalahan dan menarik untuk diteliti yaitu tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver Go-Jek. Maka judul skripsi adalah “tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online”.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, h.137.

¹⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006), h.45.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung.
- b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis dan akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver dan diharapkan mengetahui tinjauan hukum Islam dalam

menggali hal-hal yang berkaitan tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver, yang sesuai dengan syariat Islam. Dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran ke Islaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri penulis maupun orang lain dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H Jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan penelitian ini maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.¹⁶ Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, dan aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.¹⁷

Alasannya peneliti menggunakan metode kualitatif adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan jenis

¹⁶ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 21-23.

¹⁷ Consuelo G.sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), h.71.

penelitian ini berlandaskan pemahaman akan realitas sosial berdasarkan konteksnya. Sehingga metode kualitatif ini dianggap sesuai untuk penelitian tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung yang telah saya lakukan .¹⁸

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹⁹ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada shelter Kemiling Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver yang ditinjau dari hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan Menurut S.Nasition data primer

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 3-5.

¹⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.²⁰ Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari mekanisme dan bagaimana sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung, dan bagaimana caranya agar masyarakat mengetahui sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara dengan manajer dari perusahaan Go-Jek dan beberapa driver Go-Jek di Shelter Kemiling Bandar Lampung.²¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapati dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.²² Data sekunder yang diperoleh peneliti dari tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari buku-buku, internet dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), h.129.

²¹ *Ibid.*, h.130.

²² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h.74.

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²³ Dalam hal ini dilakukan pengamatan dan observasi tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada shelter Kemiling Bandar Lampung.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.²⁴ Pada praktiknya penulis menyediakan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini adalah manajer perusahaan Go-Jek dan driver Go-Jek sehingga proses interview bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara observasi dan interview, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem bagi hasil Go-Jek, baik itu bersifat resmi maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu

²³ Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 70.

²⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2016), h.137.

dokumen intern dan ekstern.²⁵ Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumen intern berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan bagi hasil baik itu kontrak kerja atau prosedur kerja. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga, seperti : koran, berita-berita yang disiarkan oleh media massa, pengumuman atau pemberitahuan. Dalam penelitian ini dokumen ekstern berupa promo-promo tarif Go-Jek yang selalu berubah dan kebijakan tentang operasionalnya.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi diartikan sebagai generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan ditarik kesimpulannya.²⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 130, terdiri dari driver Go-Jek Shelter Kemiling yang berjumlah 127 orang dan pihak perusahaan Go-Jek yang berjumlah 3 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti dalam suatu penelitian.²⁷ Menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasi kurang dari 100 orang, maka yang dijadikan sebagai sampel adalah

²⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2007), h.126.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130.

²⁷ *Ibid.*, h. 131.

keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya jika populasinya lebih besar dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁸

Mengacu kepada pendapat tersebut di atas, penulis mengambil jumlah sampel penelitian sebesar 10%, yaitu $130 \times 10\% = 13$ orang, yang terdiri dari 10 orang dari pihak Driver Shelter Kemiling dan 3 orang dari pihak perusahaan Go-Jek. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Yakni dalam menetapkan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi sampel adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada.²⁹

6. Metode Analisis Data

Analisis data menurut moleong adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰ Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar

²⁸ *Ibid.*, h. 132.

²⁹ *Ibid.*, h. 134.

³⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 103.

peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.³¹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk bagi hasil yang dijalankan oleh perusahaan kepada drivernya. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver yang ditinjau dari hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

³¹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), h. 220.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, sesuai dengan kesepakatan bersama antar pihak. Menurut Antonio, bagi hasil adalah semua sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).³²

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan, dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Secara definitif *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³³ Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai ialah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

³³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 20.

pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.³⁴

Sistem *Profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.³⁵

Selain *profit sharing*, dalam dunia perbankan syariah juga dikenal istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. Jadi *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue sharing* pada perbankan Syariah dapat diartikan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³⁶

³⁴ *Ibid.*, h. 21.

³⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
h. 82.

³⁶ *Ibid.*, h. 83.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan Syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif yang dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga atau riba yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mekanisme bagi hasil merupakan core product bagi Islamic financial institusional, seperti Islamic Banking. Sebab Islamic Banking melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya.³⁷

Pembahasan sistem bagi hasil dalam penelitian ini adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil keuntungan dari usaha atau kerjasama perusahaan Go-Jek dengan drivernya. Pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan suatu kontrak perjanjian di awal driver menjadi mitra Go-Jek dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, akad *mudharabah*, *musyarakah*, *muzarra'ah*, dan *musaqah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Karena kedua produk tersebut biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil kerjasama. Sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* digunakan khusus untuk pembiayaan dalam pertanian.³⁸

Pada mekanisme bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh ataupun sebagian,

³⁷ *Ibid.*, h. 85.

³⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), h. 150.

atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Agar menciptakan keadilan antara kedua belah pihak.

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola modal). Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis bukan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan disebutkan dalam perjanjian awal.³⁹

Inti mekanisme sistem bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* (penyedia modal) dengan *mudharib* (pengelola). Kerjasama dalam Islam adalah suatu bentuk tolong menolong yang diperintahkan selama kerjasama berlangsung adil dan tidak menimbulkan dosa dan permusuhan, itu merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Melalui sistem bagi hasil kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek kerjasama yang disepakati bersama.⁴⁰

Alasan sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga, karena bagi hasil akan menciptakan beberapa hal sebagai berikut :⁴¹

a. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.

³⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, (Bandung: Pustaka, 1969), h. 139.

⁴⁰ Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga penerbit FEUI), h. 13.

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 33.

- b. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
- c. meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
- d. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat.
- e. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
- f. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Melalui kerjasama sistem bagi hasil yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang merata. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2. Macam-Macam Bagi Hasil

Macam-macam bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu , *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan prinsip kontrak kerjasama pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Maka dalam penelitian ini

macam-macam bagi hasil yang dibahas hanyalah *mudharabah* dan musyarakah, karena berkaitan dengan sistem bagi hasil yang akan diteliti.

a. *Mudharabah*

1). Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. *Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut *qiradh* yang berarti al-qath (potongan). Kata *mudharabah* berasal dari kata *darb* yang berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴² Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴³

⁴² Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Kropyak, 1993), h.236.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 135.

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{3}$ dan sebagainya.⁴⁴

Menurut istilah syara', *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk kerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* di kemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

a). Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴⁵

b). Menurut ulama Hanafiah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dan yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa untuk mengelola harta itu.

⁴⁴ Muhammad Muslaehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 63.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 136.

عُقْدُ عَلِ السَّرَكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ لَجَائِنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخِرِ^{٤٦}

Artinya : Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

c). Malikiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* adalah :

عُقْدُ تَوَكُّلٍ صَا دَرَمِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصِ النَّقْدِ يَنْ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)^{٤٧}

Artinya : Dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

d). Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah:

عِبَارَةُ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مَعِينًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجَرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ^{٤٨}

Artinya : Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

e). Menurut ulama syafi'iyah berpendapat, bahwa *mudharabah* adalah:

عُقْدُ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَا لَا لِيَجْرِي فِيهِ^{٤٩}

Artinya : Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *mudharabah* di tujarahkan.

⁴⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh al-Madzhab Al-Ar Baah*, Juz 11, (Mesir: Tiariyah Qubra, tt), h. 35.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 38.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 42.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 44.

g). Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian.⁵⁰

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

2). Dasar Hukum *Mudharabah*

Tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang *mudharabah* dari Al-Quran atau As-Sunnah, namun demikian akad *mudharabah* tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan kita untuk berniaga dan mencari keuntungan yang halal, serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang bermanfaat atau yang manfaatnya lebih besar dari mudharatnya. Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah *mubah* (boleh). Para ulama madzhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunah, *ijma*, dan *qiyas*. Berikut penjelasan tentang dalil-dalilnya :

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, alih bahasa, Kamaludin A. marzuki, (Semarang: Al-Ma'arif, 1997), h. 36.

a). Al-Quran

Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁵¹

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.⁵²

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183 :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ

Artinya : “Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya.”⁵³

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 80.

⁵² *Ibid.*, h. 106.

⁵³ *Ibid.*, h. 28.

b). As-Sunah

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah).

Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda :

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ⁵⁴

Artinya : Dari Shuhaib r.a bahwasanya Nabi Saw Bersabda, “Ada tiga perkara yang diberkati : Jual beli yang ditangguhkan, memberi modal untuk didagangkan, dan mencampur gandum dengan jagung untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

c). Ijma

Diantara dalil-dalil kuat yang menunjukkan akan disyariatkannya *mudharabah* ialah *ijma* dalam *mudharabah*, yakni adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amir, dan Siti Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya.

⁵⁴ Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Akhyar, 773 H-852 H), h. 157.

d). Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *Al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidaklah memiliki modal.⁵⁵ Dengan demikian adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan dua golongan tersebut yakni, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁵⁶

3). Macam-Macam *Mudharabah*

Ulama Hanafiah membagi bentuk akad kepada dua bentuk⁵⁷, yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* itu jatuh kepada fasid, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap

⁵⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 191.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 370.

⁵⁷ Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh al-Hadithsah, tt), h.

seperti dalam *mudharabah* shahihah dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.⁵⁸

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqh membagi akad kepada dua bentuk⁵⁹, yaitu *mudharabah* mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah* muqayyadah, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, dalam *mudharabah* muqayyadah, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.⁶⁰

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqh, tokoh-tokoh dalam bidang fiqh muamalah pun membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah* *muthlaqah* dan *mudharabah* *muqayyadah*.⁶¹

a). *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam akad *Mudharabah Muthlaqah*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad ini pekerjaan atau bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.⁶²

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 167.

⁵⁹ Ibnu Qadamah, *Op. Cit.*, h. 32.

⁶⁰ H. Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.178

⁶¹ Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.52.

⁶² Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad*, Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah IAIN RIL., Vol.XII, No. 3, Juni 2015), h. 495.

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan *shahibul maal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan.⁶³ Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana saja usaha tersebut dilakukan. Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul maal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi, dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.⁶⁴ Dengan demikian maka jelaslah bahwa *mudharabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal

⁶³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 1197.

⁶⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 149.

(*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan. Dengan ketentuan sebagai berikut :⁶⁵

- (1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- (2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik, mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- (3) Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
- (4) Pemilik modal (tabungan *mudharabah*) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- (5) Deposit *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

b). *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah pemilik modal memberikan modalnya kepada seseorang untuk dipakai dalam usaha yang telah ditentukan. Dalam mengaplikasikan dana investasi kepada

⁶⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 150.

pengusaha dengan kejelasan jenis usaha, jumlah dana dan nisbah bagi hasil yang kesemuanya berdasarkan kontrak yang telah disepakati.⁶⁶

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.⁶⁷

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan. Dalam hal *mudharabah* tersebut harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus, dimana pemilik modal dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.⁶⁸

⁶⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Op. Cit.*, h. 495.

⁶⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Op. Cit.*, h. 1197.

⁶⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 60.

4). Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun dan syarat *mudharabah* merupakan hal penting, sebab *mudharabah* yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad kerjasama *mudharabah* tersebut akan dinilai tidak sah atau batal hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat *mudharabah* sehingga kerjasama itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

a). Rukun Mudharabah

Rukun *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.⁶⁹ Dalam *ijab* dan *qabul* ini tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*, karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan katanya.

Menurut Adi Warman Karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan disebutkan bahwa rukun *mudharabah* ada 4 yaitu :⁷⁰

(1). Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku merupakan faktor pertama, kiranya sudah cukup jelas dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku.

Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 38.

⁷⁰ Adiwarmman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 191.

(*mudharib*). Tanpa ada keduanya, maka akad *mudharabah* tidak ada.⁷¹

(2). Objek Mudharabah (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

(3). Ijab dan Qobul

Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama rela). Si pemilik modal setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

(4). Nisbah Keuntungan

Faktor keempat yakni *nisbah*, adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli, nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang menjalankan akad *mudharabah*. Mudharib

⁷¹ Nasroen Haruen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gya Media, 2007), h. 176.

mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Namun bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, maka pembagian kerugiannya itu bukan didasarkan atas *nisbah*, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak.⁷²

b). Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah*, menurut Sayyid Sabiq harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁷³

- (1). Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak, emas hiasan atau emas dagangan, maka *mudharabah* itu batal.
- (2). Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah pengampuan.

⁷² *Ibid.*, h. 193.

⁷³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 199.

(3).Bahwa modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antrar modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

(4).Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal (*shahibul maal*), dan qabul dari pengelola (*mudharib*).

(5).Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan milik pemodal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.

(6).*Mudharabah* bersifat mutlak, bahwa pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di daerah tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, dan pada waktu tertentu.

6). Prinsip Mudharabah

Prinsip *mudharabah* adalah ketentuan-ketentuan dasar sebagai landasan atau pondasi berlangsungnya suatu kegiatan *mudharabah*. Selain itu prinsip *mudharabah* mengandung pengertian lain yakni prinsip bagi hasil yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola. Dalam pelaksanaan *mudharabah* jelas bahwa prinsip yang digunakan adalah prinsip bagi hasil karena apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka yang menanggung kerugian financial hanyalah *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan selama

mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁷⁴

Prinsip-prinsip pembiayaan *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya pembiayaan *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syariat Islam dan aturan fiqh muamalah. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam pembiayaan *mudharabah* ini sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut :⁷⁵

a). Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*

Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunah Rasul. Dalam pembiayaan *mudharabah* harus berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam. Selain itu juga telah menjadi kesepakatan para ulama dan kaum Muslimin tentang kebolehan akad *mudharabah* ini. Para ulama berpendapat demikian dikarenakan adanya manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah, dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit), selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.⁷⁶ Dan yang

⁷⁴ Suhrawardi K.Lubis, *Op. Cit.*, h. 60.

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), h. 10.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 11.

terpenting adalah kerjasama sistem *mudharabah* ini merupakan sistem kerjasama yang bebas dari praktek bunga (*riba*).

b). Prinsip sukarela tanpa paksaan

Menurut Sayyid Sabiq *mudharabah* ini terjadi apabila terdapat *ijab* dan *qobul* antara pemilik modal dan pengelola.⁷⁷ Akad *ijab* dan *qobul* ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada dari salah satu pihak yang melaksanakan akad. Karena akad ini mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak pula boleh salah satu pihak pun yang melakukan akad *mudharabah* dalam keadaan terpaksa.⁷⁸

Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi. Untuk itulah dalam bentuk kerjasama sistem *mudharabah* ini dituntut adanya kebebasan bagi pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keahlian mereka. Dalam arti pemilik modal tidak memberikan batasan atau menentukan pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.

c). Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 132.

⁷⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 14.

tidak bisa diabaikan. Kenyataan membuktikan bahwa sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, akan tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang membutuhkan. Disisi lain, tidak jarang orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan inilah diperlukan kerjasama antara orang-orang yang memiliki modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerjasama *mudharabah*, kedua belah pihak sangat diuntungkan, disatu pihak pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikan. Dilain pihak, bagi orang-orang yang miskin atau kekurangan modal ia akan merasa sangat terbantu dalam berusaha. Ia bisa berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup dan taraf perekonomian mereka.⁷⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kaum muslimin sepakat bahwa *mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama yang dibenarkan oleh Islam, karena membawa kemaslahatan dan dapat

⁷⁹ *Ibid.*, h. 13.

menghilangkan kemudharatan, seperti kemiskinan dan pengangguran.

d). Prinsip keadilan

Dalam pembiayaan *mudharabah* tampak jelas yang menjadi prinsip kerjasama ini, yaitu semangat kebersamaan dan keadilan. Hal itu dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, dimana kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.⁸⁰ Apabila kerugian itu merupakan akibat dari bisnis, bukan karena rekayasa dan pihak pengelola menanggung kerugian skill dan waktu. Dan apabila mendapat keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸¹

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat bermanfaat dan diperlukan. Manfaat akad *mudharabah* akan terasa urgensinya untuk membantu perekonomian kaum lemah yang kekurangan modal dalam usahanya guna menopang hidup, menjaga kesenjangan antara orang kaya dan miskin guna menghindari kecemburuan sosial, dan yang terpenting adalah untuk menghindari segala bentuk praktek usaha yang dilarang oleh syariat Islam yang sering kali dipraktekkan oleh para rentenir.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 14.

⁸¹ Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayuasa, 1992), h. 22.

b. Musyarakah

1). Pengertian Musyarakah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Ibrahim Anis mengemukakan arti *syirkah* menurut bahasa ialah, ia bersekutu dalam suatu persekutuan : masing-masing dari kedua peserta itu memiliki bagian dari padanya.⁸²

Menurut istilah, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain :

a). Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah :

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ⁸³

“Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

b). Menurut Hanafiah

الشَّرْكَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ⁸⁴

“*Syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan”.

⁸² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 125.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 294.

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 793.

c). Menurut Malikiyah

الشَّرْكَةُ هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيْ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِمَا حَبِىْهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا⁸⁵

“*Syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *tasarruf* bagi keduanya beserta dari mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan terhadap teman serikatnya untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak *tasarruf* bagi masing-masing peserta”.

d). Menurut Syafi’iyah

وَفِي الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَا عِدَا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ⁸⁶

“*Syirkah* menurut syara’ adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

e). Menurut Hanabilah

الشَّرْكَةُ هِيَ الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ⁸⁷

“*Syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*”.

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak

⁸⁵ *Ibid.*, Juz 4, h. 792.

⁸⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 1, (Surabaya: Dar Al-Ilmi, tt), h. 226.

⁸⁷ Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, (Damaskus: Dar Al-Fikr, tt), h. 54.

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Suatu usaha yang dilakukan dalam kerjasama kedua pihak merupakan suatu usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang sesuai porsi mereka bekerjasama.

Dari beberapa pengertian *syirkah* yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional sampai batas modal masing-masing.

2). Dasar Hukum Musyarakah

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan *ijma*. Dasar dari Al-Quran antara lain :

Dalam Al-Quram Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 11:

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : "...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga."⁸⁸

Firman Allah SWT dalam surat As Shaad ayat 24 :

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 78.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٥﴾

Artinya :

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”⁸⁹

Adapun dasar hukum dari sunnah antara lain :

Hadis Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَائِ، مَا لَمْ يَخُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا⁹⁰

“Dari Abu hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman : Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (HR. Abu Dawud)

Maksud dari hadis di atas, Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

⁸⁹ Ibid., h. 454.

⁹⁰ Al-Hafizh Bin Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Muh Rifai, (Semarang: Wicaksana, 1990), h. 513.

Di samping dasar dari Al-Quran dan sunnah, para ulama juga sepakat tentang dibolehkannya *syirkah* secara global (umum). Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang beberapa jenis *syirkah*.

3). Macam-Macam Musyarakah

Secara garis besar, *syirkah* terbagi kepada dua bagian yaitu, *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud*.

a). Syirkah Al-Amlak (kepemilikan)

Syirkah al-amlak adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad.⁹¹ *Syirkah* ini tercipta karena warisan, hibah, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.⁹² Contoh, dua orang atau lebih diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam *syirkah al-amlak*, para ulama sepakat membagi *syirkah* menjadi dua macam diantaranya :

(1). Syirkah Ikhtiyariah (sukarela)

Syirkah Ikhtiyariah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.⁹³ Contoh A dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi atau diwasiati sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima hibah atau wasiat tersebut.

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 794.

⁹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 186.

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 344.

Dalam contoh ini pembeli yaitu A dan B, orang yang dihibahi, dan orang yang diberi wasiat (A dan B) bersama-sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.

(2). *Syirkah Jabariyah* (paksaan)

Syirkah ini merupakan suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harta yang diterima karena terpaksa oleh mereka.⁹⁴ Maksudnya sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak, yang artinya perserikatan itu terjadi karena terpaksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contohnya, A dan B menerima warisan sebuah rumah, rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolak.

Hukum kedua *syirkah* ini adalah bahwa masing-masing orang yang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan *tasarruf* terhadap barang yang menjadi bagian temannya tanpa izin temannya tersebut. Karena meskipun mereka bersama-sama menjadi pemilik atas barang tersebut, namun masing-masing anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*, h. 344.

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 794.

b). Syirkah Uqud

Syirkah uqud adalah bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.⁹⁶ Kalangan ulama menjelaskan berbagai syarat-syarat *syirkah uqud* ialah, bisa diwakilkan, jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas, dan bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan dan tidak tertentu.

Menurut Ulama Hanbali, *syirkah uqud* dibagi dalam lima macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan*, dan *syirkah mufawadhah*.⁹⁷ Sedangkan menurut Ulama Hanafi membagi *syirkah* pada tiga bentuk, yaitu: *syirkah al-amwal*, *syirkah al-ʿamal*, dan *syirkah al-wujuh*.⁹⁸ Dan menurut Ulama Maliki dan Syafi'i sepakat membagi bentuk-bentuk *syirkah uqud* menjadi empat macam, yaitu: *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujuh*, *syirkah inan*.⁹⁹

Ulama fiqih sepakat mengemukakan perserikatan yang termasuk dalam kategori *syirkah uqud*, ialah :

(1).Syirkah ‘Inan

Sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa *syirkah inan* adalah suatu persekutuan atau kerjasama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 344.

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 795.

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ Syamsuddin, Ahmad Ar-Ramli, *Nihayah Al-muhtaj*, Juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, tt), h. 4-5.

keuntungan dibagi diantara mereka, dengan porsi harta (modal) yang tidak mesti sama.¹⁰⁰ *Syirkah inan* adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, dan bila terjadi kerugian juga ditanggung bersama. Dengan demikian, dalam *syirkah* ini antar pihak tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan dalam kerugian ia dibebaskan.¹⁰¹ Sehingga ulama sepakat bahwa *syirkah inan* diperbolehkan. Kerjasama *syirkah inan* ini seolah terikat dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku diantara mereka, sehingga para pihak yang terlibat dalam perkongsian ini tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang terkait dengan pengelolaan usaha.

Syirkah inan sah apabila dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum, modal bukan harta tanggungan. Masing-masing pihak yang terlibat dari *syirkah* ini juga harus mengetahui kadar dan jumlah modal yang disertakan dalam perkongsian. Ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam *syirkah inan*, yaitu : Pertama, modal *syirkah* hendaknya nyata, tidak dalam bentuk hutang atau harta tidak ada. Karena tujuan dari *syirkah* ini adalah mendapat keuntungan, sementara keuntungan tidak didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Kedua, modal *syirkah*

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, h. 295.

¹⁰¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 164.

hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang, dirham, atau dinar dimasa lalu, atau mata uang yang tersebar luas dimasa modern ini.¹⁰²

Dalam *syirkah inan* tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, *tasarruf* (tindakan hukum), dan keuntungan serta kerugian. Dengan demikian dalam *syirkah inan*, antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, modal yang diinvestasikannya boleh sama dan boleh berbeda. Misalnya A, B, dan C masing-masing menanamkan modal untuk perusahaan sebesar Rp.50.000.000,00. Atau A menanamkan modal Rp.50.000.000,00, B sebesar Rp.40.000.000,00 dan C hanya Rp.10.000.000,00. Dalam hal modal yang diinvestasikan sama, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama antara para pihak dan boleh pula berbeda. Hal tersebut tergantung pada kesepakatan bersama yang dibuat oleh para pihak pada waktu terbentuknya akad. Adapun dalam hal kerugian maka perhitungannya disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.¹⁰³

(2). Syirkah Mufawadhah

Mufawadhah dalam arti bahasa adalah *al-musawah* yang berarti “persamaan”. Dikatakan *syirkah mufawadhah* dikarenakan terdapat unsur persamaan dalam modal,

¹⁰² Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 132.

¹⁰³ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 797.

keuntungan, melakukan *tasarruf* (tindakan hukum), dan lain-lainnya.¹⁰⁴ Menurut Sayid Sabiq, *mufawadhah* diambil dari kata *at-tafwidh* (penyerahan), karena masing-masing pihak menyerahkan hak untuk melakukan *tasarruf* kepada teman perkongsiannya.¹⁰⁵ Dalam arti istilah, Menurut Wahbah Zuhaili, *syirkah mufawadhah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal.¹⁰⁶

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah mufawadhah* adalah suatu perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana setiap pihak menjadi penanggung jawab atas pihak yang lainnya. Yakni masing-masing pihak terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak yang lain dalam semua hak dan kewajiban. Dengan demikian, semua pihak saling menanggung hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Dapat dipahami bahwa dalam *syirkah mufawadhah* semua pihak yang berkerjasama harus terlibat dalam perserikatan secara proporsional dan harus relatif sama. Masalah modal sesuai dengan kesepakatan dan proporsi yang sama dan

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 797.

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 296.

¹⁰⁶ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 798.

apabila ada kerugian akibat kelalaian salah satu pihak maka pihak tersebut yang menanggung kerugiannya.

Dalam *syirkah mufawadhah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu, Pertama, harus adanya persamaan dalam modal. Apabila salah satu pihak dari pihak yang melakukan perkongsian, modal nya lebih besar dari pihak yang lainnya, maka *syirkah mufawadhah* ini hukumnya tidak sah. Kedua, Persamaan dalam hak *tasarruf*. Maka tidak sah *syirkah mufawadhah* antara anak yang masih di bawah umur dan orang dewasa, karena hak *tasarruf* keduanya tidak sama. Ketiga, bahwa modal *syirkah* hendaknya nyata dan modal harus berupa barang berharga dan bernilai, yaitu umumnya uang. Keempat, tiap-tiap pihak harus menjadi penanggung jawab atas pihak yang lainnya dalam hak dan kewajiban, sekaligus sebagai wakil. Dengan demikian, tindakan hukum pihak yang satu tidak boleh lebih besar daripada tindakan hukum pihak yang lainnya. Kelima, persamaan dalam pembagian keuntungan antar pihak. Jika kedua pihak mensyaratkan perbedaan keuntungan, maka akad tersebut tidak bisa disebut *syirkah mufawadhah*, mengingat tidak adanya persamaan dalam keuntungannya. Keenam, *syirkah* ini hendaknya dilakukan pada semua jenis perdagangan yang diperbolehkan. Apabila syarat-syarat persamaan tersebut

dipenuhi maka akad *syirkah* dengan bentuk *mufawadhah*, hukumnya sah.¹⁰⁷

(3).Syirkah Wujud

Syirkah wujud menurut Sayid Sabiq, adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.¹⁰⁸ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah wujud* adalah suatu *syirkah* atau kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal). Dalam *syirkah wujud* yang menjadi modal mereka adalah reputasi kejujuran dan integritas mereka dalam bekerja.

Menurut Hanafiah, Hanabilah, dan Zaidiyah, *syirkah wujud* hukumnya boleh, karena bentuknya berupa satu jenis pekerjaan. Kepemilikan terhadap barang yang dibeli boleh berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya. Sedangkan keuntungan dibagi antara peserta, sesuai dengan besar kecilnya

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 296.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 297.

bagian masing-masing dalam kepemilikan atas barang yang dibeli. Akan tetapi, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa *syirkah wujuh* hukumnya batal. Alasan mereka adalah bahwa syirkah selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan, sedangkan dalam *syirkah wujuh*, keduanya (harta dan pekerjaan) tidak ada. Yang ada hanya penampilan anggota serikat, yang diandalkan untuk mendapatkan kepercayaan dari pedagang. Selain itu, akan mendekatkan pada munculnya unsur penipuan sebab perserikatan mereka tidak dibatasi oleh pekerjaan tertentu.¹⁰⁹

(4).Syirkah Abdan

Menurut Sayid Sabiq, *Syirkah abdan* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan.¹¹⁰ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah abdan* atau bisa disebut juga *syirkah a'mal* adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama. Contohnya, tukang batu dengan beberapa temannya berserikat dalam mengerjakan pembangunan sebuah

¹⁰⁹Syaikh al-'Allamah Muhammad bi Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2016), h. 251.

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 298.

gedung sekolah. Kerjasama tersebut bisa dalam satu jenis pekerjaan yang sama, seperti tukang batu dengan tukang batu, dan bisa juga dalam jenis-jenis pekerjaan yang berbeda. Misalnya kerjasama antara tukang batu dan tukang kayu dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung sekolah.

Risiko dalam *syirkah abdan* pada dasarnya ditanggung bersama pihak yang berkongsi. Apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak, maka salah satu pihak tersebut yang bertanggung jawab atas risiko tersebut.

Beberapa Ulama Malikiyah mengajukan beberapa syarat untuk keabsahan *syirkah abdan* ini, yaitu: pertama, pekerjaan atau profesi antara para pihak harus sama. Apabila profesinya berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali pekerjaan saling mengikat. Misalnya tukang kayu dan tukang batu dalam mengerjakan sebuah rumah. Dalam contoh ini hukum *syirkah*-nya dibolehkan karena pekerjaan yang satu bergantung kepada pekerjaan yang lainnya. Kedua, tempat pekerjaan juga harus satu lokasi, apabila lokasi keduanya berbeda, maka *syirkah*-nya tidak sah. Ketiga, pembagian upah harus sesuai dengan kadar pekerjaan yang disyaratkan bagi setiap anggota serikat.¹¹¹

¹¹¹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 803-804.

(5). Syirkah al-Mudharabah

Syirkah al-mudharabah adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian, *mudharabah* dapat dikatakan sebagai syirkah antara pemodal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.¹¹² Atau dengan kata lain, yakni kerjasama antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalitas atau tenaga.

4). Rukun dan Syarat Musyarakah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang meneentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.¹¹³

Secara umum, rukun *syirkah* ada tiga yaitu :

- a). *Sighat* atau *ijab qabul*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

¹¹² Ghufroon A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 195.

¹¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1510.

b).Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.

c).Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah, ini biasanya berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.¹¹⁴

Rukun *syirkah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya *ijab* dan *qabul*. Maka sah atau tidaknya *syirkah* tergantung pada *ijab* dan *qabulnya*. Misalnya: aku telah terima.¹¹⁵ Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi. Dalam rukun *syirkah* Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu *shighah ijab* dan *qabul*. Karena shihahlah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.¹¹⁶ Perjanjian *sighat* atau lafadz, dalam praktiknya biasanya diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akta pendirian perserikatan itu. Dengan

¹¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.213.

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 195.

¹¹⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 264.

demikian, hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Sedangkan syarat sahnya *syirkah*, perlu diketahui syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹¹⁷ Menurut Imam Syafi'i, syarat-syarat *syirkah* ada lima yaitu :

- a).Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b).Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya.
- c).Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- d).Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- e).Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.¹¹⁸

Secara umum, syarat-syarat akad *syirkah* yaitu :

- a).Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis.
- b).Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

¹¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h.1691.

¹¹⁸ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir cet 1), h. 213.

c).Objek Kontrak, yaitu dana dan kerja. Di mana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini, beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu dilakukan, menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Kemudian, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.¹¹⁹

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Prinsip ini dapat di temukan dalam prinsip Islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama yang lebih besar, atau kerjasama antara pemilik modal

¹¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 200.

yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha dengan yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

5.) Tujuan dan Manfaat Syirkah

Tujuan dan manfaat *syirkah* sebagai berikut :

- a). Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- b). Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya.
- c). Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha syirkah untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.

3. Berakhirnya Akad Bagi Hasil

Suatu akad akan dikatakan berakhir apabila telah mencapai tujuan. Misalnya dalam melakukan kerjasama, akad dikatakan berakhir bila keuntungan dan kerugian telah disepakati. Selain itu akad dipandang berakhir bila telah terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya. Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad berakhir karena beberapa faktor sebagai berikut: modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

a. Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* bisa saja berakhir dengan berbagai kejadian baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sebenarnya lama kerjasama yang dibangun dalam akad ini tidak tentu dan tidak memiliki batasan. Namun banyak pihak yang memilih menentukan jangka waktu

yang jelas agar usaha dan transaksi berjalan dengan jelas. Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- 1). Akad *mudharabah* berakhir karena waktu yang telah ditentukan.
- 2). Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- 3). Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- 4). Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.

Akad *mudharabah*, akan dikatakan *fasid* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, misalnya seseorang yang memiliki modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola (*mudharib*) untuk berburu bersama-sama dan keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* ini *fasid*, karena *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul mal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Hendi Suhendi dalam bukunya,¹²⁰ Akad *mudharabah* akan berakhir jika :

- 1). Tidak terpenuhi syarat sahnya. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya berdasarkan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas maka ia berhak menerima

¹²⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 143.

upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika terjadi kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

2). Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

3). Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

b. Berakhirnya Akad Syirkah

Dalam buku Hendi Suhendi, akad syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

1). Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

2). Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

- 3).Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4).Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5).Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 6). Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang ada.¹²¹

¹²¹ *Ibid.*, h. 133-134.

B. Sistem Pembagian Keuntungan dan Kerugian Bagi Hasil Dalam Hukum Islam

Dalam kerjasama bagi hasil antara satu pihak atau lebih pasti akan menghadapi yang namanya keuntungan dan kerugian, berikut adalah beberapa sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil :

1. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70: 30, 60:40, atau 80:10. Jadi, nisbah keuntungan ini ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

2. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari akad bagi hasil itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Begitupun sebaliknya dengan kerugian.

3. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis, bukan karena risiko karakter yang buruk, misalnya karena *mudharib* lalai atau melanggar

persyaratan-persyaratan kontrak bagi hasil, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.

4. Menentukan besarnya nisabah

Besarnya nisabah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad. Jadi, angka besar nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar kesepakatan antara para pihak. Dengan demikian maka angka nisbah setiap bagi hasil bervariasi.

5. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah : pertama, diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kedua, bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.¹²²

Jadi dalam kerjasama yang dilakukan pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam bagi hasil akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak yang melakukan kelalaian.

¹²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 204.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Perusahaan Go-Jek

1. Sejarah Berdirinya Go-Jek

Ide Go-Jek muncul oleh seorang pemuda yang sangat kreatif yaitu Michaelanglo Maron dan Nadiem Makarim. Awalnya pada saat Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Para tukang ojek menunggu lebih dari 8 sampai 10 jam, akan tetapi mereka hanya mendapatkan penumpang 4 sampai 7 orang penumpang saja. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya, ternyata banyak yang mengeluh susah cari pelanggan. Apalagi di Jakarta kemacetan makin memburuk, jika ada layanan transport dan delivery yang cepat dan praktis, pasti akan membantu masyarakat.

Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey dan Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan waktu selama tiga tahun bekerja disana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai Co-founder dan Managing Editor di Zalora Indonesia kemudian menjadi Chief Innovation Officer kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya, karena melihat ojek pangkalan yang hampir seharian menghabiskan waktu dan belum tentu mendapatkan penumpang, Nadiem Makarim bersama Michaelanglo Maron membantu para tukang

ojek pangkalan untuk mendapatkan penumpang dengan cara yang lebih cepat dan efisien yaitu dengan mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Go-Jek Indonesia pada tahun 2011.¹²³

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok : Kecepatan, inovasi dan dampak sosial. Bermula dari sebuah perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, Go-Jek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobileplatform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya.

Para driver Go-Jek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami. Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Bali, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukit tinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto,

¹²³ <http://go-jek.com, sejarah-berdirinya-gojek>, diakses 25 Agustus 2018.

Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya di masa mendatang.¹²⁴

2. Visi dan Misi Go-Jek

a. Visi Go-Jek

Membantu memperbaiki struktur di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia baik untuk masa kini dan masa depannya.

b. Misi Go-jek

Misi perusahaan PT. Go-Jek Indonesia dalam mewujudkan visi nya, yaitu:¹²⁵

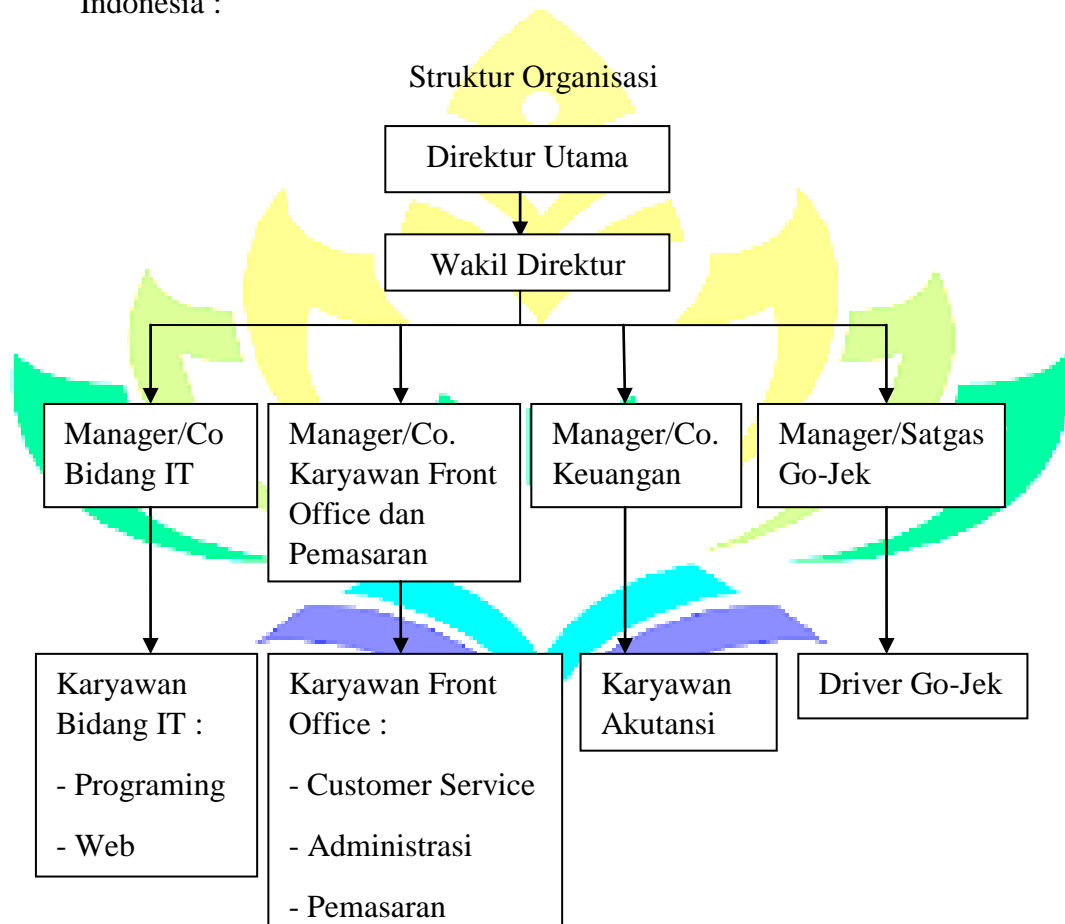
- 1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- 3) Membuka lapangan kerja sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- 5) Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.

¹²⁴ [http:// bit.ly/alamat gojek](http://bit.ly/alamat_gojek), diakses tanggal 25 Agustus 2018.

¹²⁵ http://googleweblight.com/?lite_url=http://serviceexcellencegojek.blogspot.co.id, diakses tanggal 25 Agustus 2018.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Berikut adalah susunan struktur organisasi di PT. Go-Jek Indonesia :¹²⁶



Dalam struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab kerja masing-masing, yaitu sebagai berikut:¹²⁷

¹²⁶ Wawancara, dengan Reni, Karyawan Go-Jek, tanggal 11 Agustus 2018.

¹²⁷ http://googleweblight.com/?lite_url=http://serviceexcellencegojek.blogspot.co.id, diakses tanggal 25 Agustus 2018.

a. Direktur Utama

- 1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
- 3) Bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan.
- 4) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan perusahaan.
- 5) Menentukan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
- 6) Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang.

b. Wakil Direktur

- 1) Membantu sesama tugas Direktur Utama yang merupakan wakil di masing-masing area.

c. Manager IT

- 1) Mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT GO-Jek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan.
- 2) Mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan software, hardware, brainware, dan jaringan dibidang TIK untuk mencapai kinerja optimum perusahaan Go-Jek.
- 3) Mengelola layanan perancangan system komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi.

- 4) Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang berkaitan dengan IT.

d. Manager Karyawan Front Office dan Pemasaran

- 1) Melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office.
- 2) Memastikan bahwasannya karyawan mengetahui system komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung via telepon dan standar operasional Go-Jek.
- 3) Menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa diselesaikan bawahannya.
- 4) Membuat laporan daftar pelanggan.
- 5) Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar.
- 6) Merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.

e. Manager Akuntansi

- 1) Mengkoordinasi perencanaan anggaran.
- 2) Mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 3) Mengkoordinasi pelaksanaan audit.
- 4) Melakukan system pencatatan keuangan.
- 5) Bertanggung jawab terhadap wakil direktur.
- 6) Merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi.
- 7) Menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan.

f. Manager Ojek / Satgas Go-jek

- 1) Membuat kelompok-kelompok tukang ojek.
- 2) Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek.
- 3) Selalu melakukan pengontrolan di setiap link shelter Go-Jek.
- 4) Bertanggung jawab bila ada insiden yang melibatkan para driver Go-Jek di lapangan.
- 5) Bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek.¹²⁸

g. Karyawan

1) Bidang Programming

- a) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang programming.
- b) Bertanggung jawab mengenai program kepada manager IT.

2) Bidang Web

- a) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang Web.
- b) Bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun web Go-Jek.

3) Front Office (Customer Servis, Administrasi dan Pemasaran)

- a) Melaksanakan semua pekerjaan Front Office yang ditetapkan oleh manager Front Office dan administrasi.
- b) Bertanggung jawab kepada manager Front Office dan administrasi.

¹²⁸ Wawancara, dengan Emil, Satgas Go-Jek, tanggal 12 Agustus 2018.

h. Driver Ojek

- 1) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager bagian ojek.
- 2) Mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.¹²⁹

4. Layanan Go-Jek

Berikut ini merupakan penjelasan dari berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia :

- a. Go-Ride, Transport (jasa angkutan) dengan armada motor adalah layanan utama yang diberikan oleh Go-Jek. Untuk layanan ini pihak Go-jek menyediakan masker dan penutup rambut secara gratis dan fasilitas helm yang sesuai dengan ketentuan keamanan dan kenyamanan untuk digunakan oleh penumpang. Harga yang ditampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.¹³⁰
- b. Go-Car, jasa angkutan yang diberikan oleh Go-Jek dengan menggunakan mobil yang bisa mengantar kemanapun ke lokasi yang dituju. harga akan ditampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.
- c. Go-Bluebird, Go-Jek bekerjasama dengan Blue Bird untuk menyediakan layanan pemesanan taksi Blue Bird melalui platform aplikasi Go-Jek. Harga yang ditetapkan sesuai dengan jarak kilometer yang ditempuh bukan berdasarkan argo.

¹²⁹ Wawancara, dengan Joari, Driver Go-Jek, tanggal 20 Agustus.

¹³⁰ Wawancara, dengan Izmi, Driver Go-Jek, tanggal 20 Agustus 2018.

- d. Go-Send, jasa layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang atau surat. Tarif layanan ini akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai dengan jarak pengiriman.
- e. Go-Food, jasa layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai, jasa layanan ini bekerjasama dengan lebih dari 30.000 restoran di seluruh Indonesia.
- f. Go-Mart, merupakan layanan dimana para Driver Go-Jek dapat membantu konsumen belanja apapun di toko manapun yang dituju, seperti belanja bulanan, elektronik, tiket konser, obat, atau apapun dengan batasan nominal pembelanjaan maksimal Rp. 1.000.000,-.
- g. Go-Clean, merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Go-Jek. Pengguna bisa menentukan waktu pengerjaan dan bisa memilih untuk jenis pengerjaannya. Layanan ini terbagi dalam beberapa layanan, yakni Vacuum and Sweep (menyapu / membersihkan lantai), Dish Washing (mencuci piring), Bathroom Sanitizing (membersihkan kamar mandi), dan Floor Mapping (mengepel lantai).
- h. Go-Massage, merupakan layanan jasa pijat tradisional panggilan untuk datang ke rumah. Pengguna dapat memilih gender therapist / jenis kelamin pijat. Tarif disesuaikan dengan jenis pijat yang dipilih dan durasinya. Layanan ini terbagi lagi dalam beberapa layanan, yakni Reflexology (Rp. 90.000,-/jam), Full Body Massage (Rp 100.000,-/jam),

Full Body Massage and Scrub (Rp165.000,-/1,5 jam), dan Full Body Massage and Face Pressure (Rp 165.000,-/1,5 jam).

- i. Go-Glam, merupakan layanan jasa kecantikan panggilan, ditujukan untuk konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan di rumah. Pengguna dapat menentukan waktu perawatan dan gender therapist. Tarif disesuaikan dengan jenis perawatan yang dipilih dan durasinya.
- j. Go-Box, merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah yang besar, seperti pengguna layanan yang ingin pindah rumah dan mengangkut barang-barangnya. Pada layanan ini pengguna dapat request untuk tambahan pengangkut. Tarif yang dikenakan sesuai dengan armada yang digunakan dan jarak sesuai kilometer.
- k. Go-Med, layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi. Biaya yang dikenakan adalah biaya untuk jasa pembelian dan antar sesuai dengan jarak pengguna dan apotek.
- l. Go-Tix, layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke pengguna. Pengguna dapat memilih kota dan film yang akan dipilih. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempat pembelian tiket.
- m. Go-Busway, layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantarkan pelanggan ke halte TransJakarta. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempuh per kilometer.

- n. Go-Auto, Layanan auto care, auto service dan service lainnya untuk memenuhi kebutuhan otomotif pengguna. Biaya yang dikenakan sesuai dengan service yang dipilih.
- o. Go-Pulsa, layanan pengisian pulsa langsung dari aplikasi Go-Jek menggunakan Go-pay.

5. Syarat Pendaftaran Driver Go-Jek

Calon pengemudi yang ingin menjadi driver Go-Jek (mitra) yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat bahkan dari berbagai kalangan. Hal pertama yang dilakukan bila ingin menjadi driver Go-jek ialah, melakukan pendaftaran secara online di website resmi Go-Jek. Di situ ada formulir pendaftaran secara online, kita diharuskan mengisi data-data seperti:¹³¹

- a. Nama Depan
- b. Nama Belakang
- c. Email
- d. Nomor Telepon
- e. Kota
- f. Dari mana anda mendapat informasi tentang kami ?
- g. Apakah anda sedang bekerja di perusahaan transportasi lain ?
- h. Nomor Polisi Kendaraan

Jadi setelah mendaftar online, calon driver harus menunggu panggilan dari Go-Jek lewat sms untuk daftar ke kantor Go-Jek disertai

¹³¹ Wawancara, dengan Joari, Driver Go-Jek, tanggal 20 Agustus.

dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Adapun cara lain bila tidak ingin mendaftar secara online, ialah dengan cara mengirim sms dengan format tertentu dan selanjutnya anda kirim ke nomor yang telah ditentukan oleh perusahaan Go-Jek. Adapun format sms nya adalah, GORIDE#NAMA KOTA#NAMA ANDA#NOMOR SIM ANDA. Setelah anda mendaftar melalui online maupun SMS, jika anda terpilih maka akan ada undangan dari Go-Jek lewat SMS yang menyatakan bahwa anda dipanggil untuk tes selanjutnya dengan membawa syarat dokumen.¹³²

Adapun syarat dokumen atau hal yang perlu anda siapkan adalah :

- a. KTP yang masih aktif (bawa asli dan fotokopinya).
- b. SIM yang masih aktif (bawa asli dan fotokopinya).
- c. STNK yang masih aktif (bawa asli dan fotokopinya).
- d. SKCK yang masih aktif (bawa asli dan fotokopinya).
- e. Surat keterangan domisili jika alamat sekarang berbeda dengan KTP.
- f. HP android dengan RAM minimal 512, OS 4.4.2 Kitkat.
- g. Akun email Gmail yang aktif.
- h. Siapkan paket data internet.

Setelah melengkapi syarat tersebut, maka anda harus datang ke alamat tempat pendaftaran Go-Jek. Alamat Kantor Go-Jek Bandar Lampung yaitu, Jl. MH Thamrin No. 10 Rt. 008 LK 1 Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Para calon driver yang lolos atau berhasil lolos ke tahap selanjutnya yaitu wawancara dan menyerahkan data-

¹³² Wawancara, dengan Reza, Driver Go-Jek, tanggal 22 Agustus 2018.

data di atas dan juga mengikuti sesi foto menggunakan jaket Go-Jek. Setelah proses itu dilakukan kemudian calon driver diberikan pelatihan menggunakan rekening ponsel yang bekerjasama dengan Bank Cimb Niaga untuk menarik dana deposit saldo hasil kerja setiap harinya. Setelah melakukan pelatihan tersebut, proses selanjutnya Driver diharuskan mengikuti Training dan/atau safety riding oleh pihak perusahaan Go-Jek yaitu :¹³³

- a. Training cara menggunakan aplikasi Go-Jek.
- b. Training tentang layanan-layanan yang disediakan oleh aplikasi Go-Jek.
- c. Training tentang standar pelayanan terhadap konsumen.
- d. Training tentang kode etik sebagai driver Go-Jek.
- e. Cara mengemudikan sepeda motor dan cara berinteraksi dengan customer.

6. Mekanisme Kerja Go-Jek

Pada dasarnya mekanisme kerja driver Go-Jek ialah berdasarkan aplikasi Go-Jek. Aplikasi Go-Jek tersebut dapat dikatakan sebagai jendela untuk berkomunikasi antara konsumen dengan driver Go-Jek. Driver bekerja berdasarkan layanan yang dipesan oleh konsumen, seperti layanan Go-Ride, Go-Food, Go-Send, dll.¹³⁴ Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan tentang mekanisme kerja Go-Jek untuk menjalankan layanan yang dipesan oleh konsumen.

¹³³ Wawancara, dengan Tino, Driver Go-Jek, 20 Agustus 2018.

¹³⁴ Wawancara, dengan Izmi, Driver Go-Jek, tanggal 20 Agustus 2018.

Mekanisme kerja Go-Jek untuk antar jemput (Go-Ride) ialah :¹³⁵

- a. Konsumen melakukan pemesanan melalui aplikasi Go-Jek dengan memasukkan alamat penjemputan dan alamat yang di tuju. Informasi tarif otomatis keluar setelah mengisi alamat tersebut, sehingga konsumen tahu berapa biaya yang harus dibayar.
- b. Selanjutnya aplikasi Go-Jek akan memproses pesanan tersebut untuk pencarian driver Go-Jek yang akan mengantarkan konsumen tersebut.
- c. Lalu driver Go-jek terdekat yang mendapatkan orderan dari penumpang tersebut, berhak mengantar konsumen.
- d. Driver Go-Jek akan menjemput penumpang sesuai alamat yang tertera di aplikasi Go-Jek tersebut.
- e. Setelah sampai tujuan maka penumpang akan membayar ke driver Go-Jek dengan cara cash atau Go-Pay.

Mekanisme kerja untuk antar dokumen/barang, Go-Send ialah :¹³⁶

- a. Melalui aplikasi Go-Jek, konsumen akan mengisi alamat pengambilan barang yang akan dikirim , alamat tujuan pengiriman barang serta informasi lain yang diperlukan.
- b. Pesanan tersebut kemudian akan diproses oleh Go-Jek sampai akhirnya mendapatkan driver yang berhak mengirimkan barang tersebut.
- c. Selanjutnya driver Go-jek akan mengambil dokumen/barang sesuai alamat pengambilan dan mengirimkan sesuai alamat tujuan.
- d. Sampai alamat tujuan, barang diserahkan ke penerima barang.

¹³⁵ Wawancara, dengan Emil, Satgas Go-jek, 12 Agustus 2018.

¹³⁶ Wawancara, dengan Tino, Driver Go-Jek, 20 Agustus 2018.

Mekanisme kerja Go-Jek untuk antar makanan, Go-Food ialah :¹³⁷

- a. Konsumen memilih makanan yang ingin dibeli melalui aplikasi Go-Jek (layanan Go-Food).
- b. Setelah menu makanan dipilih dan dikirim ke Go-Jek, maka Go-Jek akan memproses pesanan tersebut dan mencari driver untuk membeli dan mengantarkan makanan yang dipesan.
- c. Driver Go-Jek yang mendapatkan pesanan tersebut, maka driver Go-Jek tersebut akan membeli makanan di resto yang dipilih konsumen.
- d. Pihak resto yang mendapatkan pesanan pembelian akan menyiapkan makanannya.
- e. Makanan yang sudah dibeli oleh driver akan diantarkan ke alamat konsumen.
- f. Saat konsumen telah menerima makanannya maka ia akan membayar sejumlah harga makanannya dan ongkos kirimnya.

7. Kontrak Kerjasama Go-Jek

Kerjasama dalam perusahaan sangat dibutuhkan dalam suatu perjanjian. Berikut merupakan perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia dengan Driver Go-Jek (mitra) :¹³⁸

a. Ketentuan Umum

- 1) Persyaratan yang tertera dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini (perjanjian) mengatur hubungan antara anda, perorangan (mitra), PT

¹³⁷ Wawancara, dengan Iif, Satgas Go-Jek, tanggal 12 Agustus 2018.

¹³⁸ Dikutip dari Aplikasi Driver Go-Jek.

Aplikasi Karya Anak Bangsa, dengan ketentuan-ketentuan yang tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk kontrak Elektronik.

- 2) Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam perjanjian ini.
- 3) Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra sebagai Mitra mendaftarkan diri melalui aplikasi Go-Jek.
- 4) Aplikasi Go-Jek adalah aplikasi elektronik yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan Go-Jek ataupun AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait.
- 5) AKAB adalah pemilik aplikasi Go-Jek yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang atau jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya.
- 6) DAB atau PT Dompot Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik.
- 7) Go-Jek adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB.

- 8) Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar jemput barang dan/atau orang, pesan antar yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi Go-Jek dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri.
- 9) PAB atau PT Paket Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pos.
- 10) Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan aplikasi Go-Jek.
- 11) Persyaratan adalah syarat dan ketentuan perjanjian ini atau syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi Go-Jek maupun fitur-fitur didalam aplikasi Go-Jek.
- 12) Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.¹³⁹

b. Hubungan Kerjasama

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2017. Dengan ini mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas

¹³⁹ *Ibid.*

perjanjian ini, mengakses dan menggunakan aplikasi Go-Jek, mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara Mitra, Go-Jek dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi Go-Jek. Dengan memberikan persetujuan atas hubungan kerjasama antara mitra dengan PAB, sehubungan dengan setiap jasa pos yang dilakukan mitra. Dan DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukan melalui aplikasi. Setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PAB maupun DAB, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh PAB maupun DAB dari waktu ke waktu. Sebagaimana diinformasikan kepada mitra melalui media komunikasi lain yang dipilih oleh PAB maupun DAB.

- 2) Apabila Mitra tidak setuju dengan persyaratan ini, Mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi Go-Jek. Mitra setuju bahwa Go-Jek atau AKAB dapat secara langsung menghentikan penggunaan aplikasi Go-Jek oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra ke dalam aplikasi Go-Jek atau bagian manapun dari aplikasi Go-jek kapan pun untuk alasan apapun.
- 3) AKAB, sebagai pemilik dari aplikasi Go-Jek, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan

persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan persyaratan tersebut melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh AKAB. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas aplikasi Go-Jek maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

4) Go-Jek, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing Go-Jek, AKAB, PAB, DAB dan Mitra.

5) Bergantung kepada kepatuhan Mitra terhadap persyaratan, Go-Jek melalui hubungan kontraktual kerjasama ini dan berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB, memberi Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk, mengakses dan menggunakan aplikasi Go-Jek pada perangkat ponsel pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra semata-mata terkait dengan penggunaan mitra atas aplikasi Go-Jek. Dan mengakses dan menggunakan konten informasi dan materi terkait

yang dapat disediakan melalui aplikasi Go-Jek, dan semata-mata untuk Mitra sebagai penggunaan pribadi.

- 6) Aplikasi Go-jek dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi Go-Jek merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Penggunaan Mitra atas aplikasi Go-Jek maupun pemberian hak oleh Go-Jek kepada Mitra atas penggunaan aplikasi Go-Jek, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas aplikasi Go-Jek.
- 7) Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Go-Jek sebagai berikut :
- 8) Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki SIM yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait melalui aplikasi Go-Jek (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- 9) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
- 10) Memiliki rekening yang direkomendasikan oleh AKAB;
- 11) Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;

12) Berjanji untuk, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian “Kode Etik dan Kewajiban Mitra” dalam perjanjian ini dan kualifikasi minimum Go-Jek yang akan dijelaskan terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

13) Mitra menyetujui bahwa Go-Jek atas pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan di atas, termasuk meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh Go-Jek, selama perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana ditentukan oleh Go-Jek sendiri. Memeriksa keadaan fisik maupun surat-surat pendaftaran (STNK) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki Mitra. Meminta mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening Mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh Go-Jek, AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh Mitra apabila perjanjian ini diakhiri).¹⁴⁰

c. Penggunaan Aplikasi Go-Jek

c. 1 Pendaftaran

1) Untuk tujuan penggunaan Aplikasi Go-Jek, Mitra harus :

a) Membaca syarat dan ketentuan kerjasama dengan Go-Jek maupun AKAB berdasarkan persyaratan;

¹⁴⁰ *Ibid.*

- b) Memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal b (5) diatas;
- c) Memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian ini sebagaimana tertera pada akhir perjanjian ini; dan
- d) Mendaftar dan memelihara akun pada aplikasi Go-Jek sebagai pengguna aktif (Akun).
- 2) Untuk tujuan mendaftar dan memelihara Akun, Mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra menjamin bahwa segala informasi pribadi tertentu yang diberikan kepada AKAB adalah benar dan Mitra bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran informasi tersebut. Mitra bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi pada Akun yang dipelihara oleh Mitra. Kecuali diizinkan lain oleh AKAB secara tertulis, Mitra hanya dapat memiliki dan memelihara satu Akun.
- 3) Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada AKAB secara tertulis dalam halnya ada perubahan atas data-data mitra yang telah diberikan oleh AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama,

alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB.

- 4) Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya. Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku maupun persyaratan saat menggunakan aplikasi Go-Jek, dan Mitra menyetujui bahwa Mitra hanya akan menggunakan aplikasi Go-Jek untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Mitra tidak boleh, dalam menggunakan aplikasi Go-Jek, menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kerusakan properti terhadap pihak lain manapun. Mitra setuju bahwa Mitra dapat ditolak untuk mengakses atau menggunakan aplikasi Go-Jek jika Mitra menolak untuk memberikan bukti identitas diri.
- 5) Dengan membuat Akun, Mitra setuju bahwa aplikasi Go-Jek mungkin akan mengirimkan Mitra pesan teks informatif (baik melalui SMS atau aplikasi pengirim pesan) sebagai bagian dari penggunaan Mitra atas aplikasi Go-Jek.¹⁴¹

c. 2 Penggunaan Aplikasi

- 1) Penggunaan aplikasi Go-Jek dilakukan oleh Mitra melalui ponsel pintar. Mitra tidak dapat menggunakan aplikasi Go-Jek melalui sarana elektronik lainnya selain ponsel pintar. Mitra dilarang untuk meretas atau melakukan modifikasi ponsel pintar atau aplikasi Go-Jek untuk

¹⁴¹ *Ibid.*

tujuan lain apapun termasuk menggunakannya untuk segala macam aplikasi dan layanan yang dilarang oleh Go-Jek atau AKAB.

2) Penggunaan ponsel pintar adalah tanggung jawab Mitra sendiri termasuk namun tidak terbatas pada pembelian dari ponsel pintar tersebut, pembayaran semua biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya telepon, SMS, paket data internet.

3) Go-Jek dapat, atas keputusan Go-Jek sendiri, melakukan pengadaan ponsel pintar untuk Mitra dalam bentuk yang dapat diputuskan oleh Go-Jek sendiri termasuk bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yang bekerjasama dengan Go-Jek atau AKAB didalam pengadaan ponsel pintar tersebut. Berdasarkan syarat dan ketentuan oleh Go-Jek dan/atau Vendor. Khusus bagi Mitra yang mengadakan ponsel pintar oleh Go-Jek dan/atau Vendor, Mitra mengerti dan menyetujui bahwa :

- a) Go-Jek dan/atau Vendor mempunyai hak untuk menentukan tata cara dan metode pembayaran maupun pelunasan atas ponsel pintar yang diadakan oleh Go-Jek dan/atau Vendor;
- b) Mitra mempunyai kewajiban untuk melunasi setiap jumlah yang terutang kepada Go-Jek dan/atau Vendor berdasarkan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh Go-Jek dan/atau Vendor;
- c) Go-Jek dan/atau Vendor mempunyai hak untuk meminta Mitra untuk memberikan jaminan kepada Go-Jek dan/atau Vendor dalam bentuk yang dapat ditentukan Go-Jek dan/atau Vendor;

- d) Sebelum Mitra melunasi jumlah terhutang kepada Go-Jek dan/atau vendor untuk pengadaan ponsel pintar, Mitra dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan kepemilikan atas ponsel pintar kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Go-Jek dan/atau Vendor;
- e) Dalam hal ponsel pintar hilang dari penguasaan Mitra, Mitra diwajibkan untuk melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian di wilayah ponsel pintar hilang dan menyertakan salinan bukti laporan kepada Go-Jek dan/atau Vendor;
- f) Apabila Mitra telah melunasi seluruh jumlah terhutang kepada Go-Jek dan/atau Vendor maka ponsel pintar itu akan menjadi milik Mitra dan penggunaan ponsel pintar tersebut akan tunduk pada ketentuan berdasarkan perjanjian ini selama Mitra masih melakukan kerjasama berdasarkan perjanjian ini;
- g) Apabila Mitra tidak mampu melunasi jumlah terhutang untuk pengadaan ponsel pintar atau perjanjian ini diakhiri sebelum seluruh jumlah terhutang dilunasi, Go-Jek dan/atau vendor melalui Go-Jek mempunyai hak untuk menarik jumlah uang sebesar jumlah terhutang kepada Go-Jek dari rekening Bank Mitra pada Bank yang ditunjuk oleh AKAB.
- 4) Apabila ponsel pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra hilang, dicuri, dirusak dan/atau peristiwa lain yang menyebabkan ponsel pintar tidak lagi dalam kuasa Mitra, Mitra akan segera

memberitahukan Go-Jek dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan Go-Jek. Dalam peristiwa ini, Mitra setuju bahwa Go-Jek maupun AKAB, mempunyai hak untuk menutup akses Mitra pada akun yang dimilikinya dalam aplikasi Go-Jek.

5) Mitra mengerti dan menyetujui bahwa hanya Mitra yang diperbolehkan untuk mengakses akun yang dimiliki dan didaftarkan atas nama Mitra dalam aplikasi Go-Jek melalui ponsel pintar yang menggunakan nomor telepon yang telah diberikan kepada Go-Jek pada saat melakukan pendaftaran akun termasuk untuk melakukan pelayanan kepada konsumen. Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan ponsel pintar untuk tujuan akses akun yang dimiliki Mitra dalam aplikasi Go-Jek termasuk untuk pelayanan kepada konsumen tanpa persetujuan tertulis dari Go-Jek.

6) Go-Jek maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada akun Mitra dalam aplikasi Go-Jek apabila Go-Jek atau AKAB menganggap, dalam diskresi Go-Jek atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan Go-Jek ataupun AKAB.

7) Dalam hal pelanggaran persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa Go-Jek maupun AKAB mempunyai hak untuk mengambil

segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh Go-Jek atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra atas persyaratan aatau syarat ketentuan lain yang berlaku maupun pelanggaran yang dicurigai oleh Go-Jek maupun AKAB telah dilakukan oleh Mitra (pemutusan akses Mitra atas aplikasi Go-Jek baik secara permanen maupun sementara, pemberian surat peringatan, pengakhiran perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

8) Mitra mengakui bahwa Go-Jek merupakan pihak yang mengelola penyedia jasa pihak ketiga yang disediakan melalui aplikasi Go-Jek dan AKAB merupakan pihak penyedia aplikasi Go-Jek. Dan masing-masing Go-Jek maupun AKAB bukan merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi dan bahwa semua layanan transportasi yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen melalui aplikasi Go-Jek disediakan oleh Mitra sebagai pihak ketiga independen yang bukan merupakan afiliasi dari Go-Jek maupun AKAB dan tidak dipekerjakan oleh Go-Jek maupun AKAB.

9) Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar jemput barang atau orang yang dipesan melalui sarana selain aplikasi Go-Jek.

10) Mitra menyetujui bahwa Go-Jek maupun AKAB mempunyai hak :

a) Untuk meminta Mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada Bank yang ditunjuk oleh AKAB diatas batas tertentu, batas mana dapat ditentukan dan dirubah oleh AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dari waktu ke waktu dan akan diberitahu kepada Mitra secara tertulis.

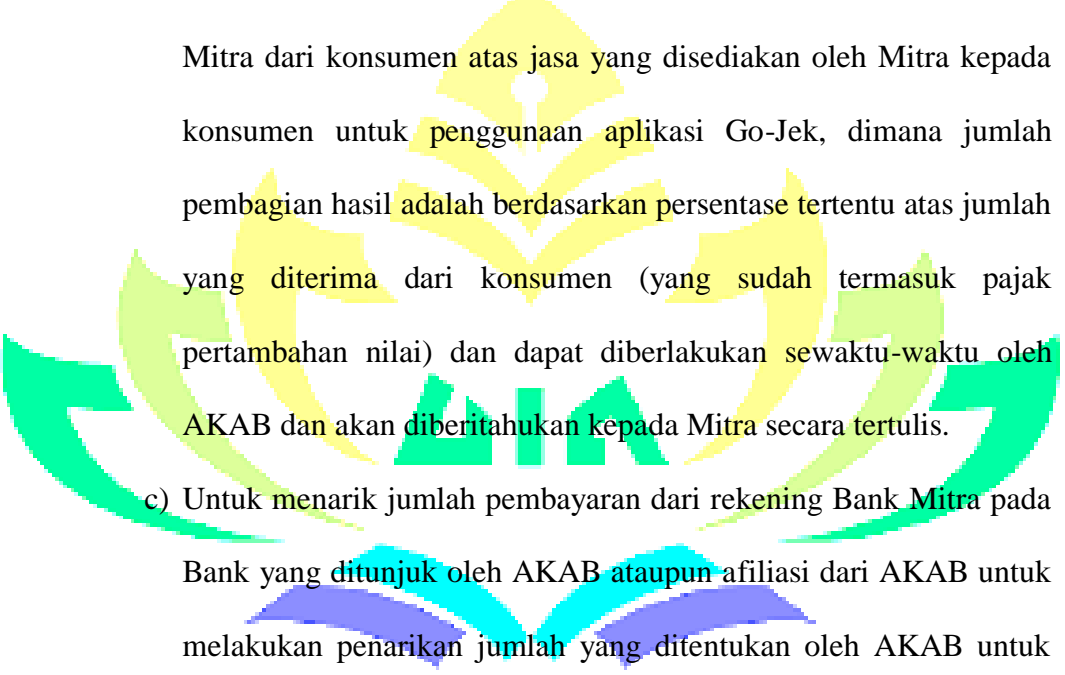
b) Untuk menahan akses Mitra kedalam akun yang dimilikinya maupun menahan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Go-Jek dalam akun yang dimiliki Mitra dalam hal, jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada Bank yang ditunjuk oleh AKAB berada dibawah batas yang telah ditentukan oleh AKAB. Mitra berhutang sejumlah uang kepada AKAB, Go-Jek atau pihak-pihak yang terafiliasi oleh Go-Jek dan dalam status menunggak pembayaran atas jumlah uang secara penuh atau jumlah sebesar cicilan atas hutang tersebut.¹⁴²

c. 3 Pembayaran Oleh Konsumen

1) Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima jasa atas jasa yang disediakan oleh Mitra dengan menggunakan Aplikasi Go-Jek (konsumen), termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh konsumen adalah harga yang ditunjukan melalui aplikasi Go-Jek.

2) Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat :

¹⁴² *Ibid.*

- 
- a) Menentukan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui aplikasi Go-Jek ataupun media komunikasi lainnya yang dipilih AKAB);
- b) Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen untuk penggunaan aplikasi Go-Jek, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu-waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis.
- c) Untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening Bank Mitra pada Bank yang ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh AKAB untuk keperluan pembagian hasil yang ditentukan oleh AKAB, atau untuk membayar uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra.
- 3) Dalam masa promosi untuk meningkatkan penggunaan aplikasi Go-Jek , Go-Jek dapat melakukan kegiatan promosi dimana biaya atas kegiatan promosi tersebut akan dibebankan kepada Go-Jek atau AKAB. Keputusan itu ditentukan berdasarkan keputusan absolut Go-

Jek maupun AKAB yang akan ditentukan secara terpisah dari perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.

4) Bila dikemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara Go-Jek ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada Go-Jek ataupun AKAB, maka perjanjian ini berhak diakhiri secara pihak oleh salah satu dari Go-Jek ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis terhadap pihak lainnya.

5) Setiap pihak dalam perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴³

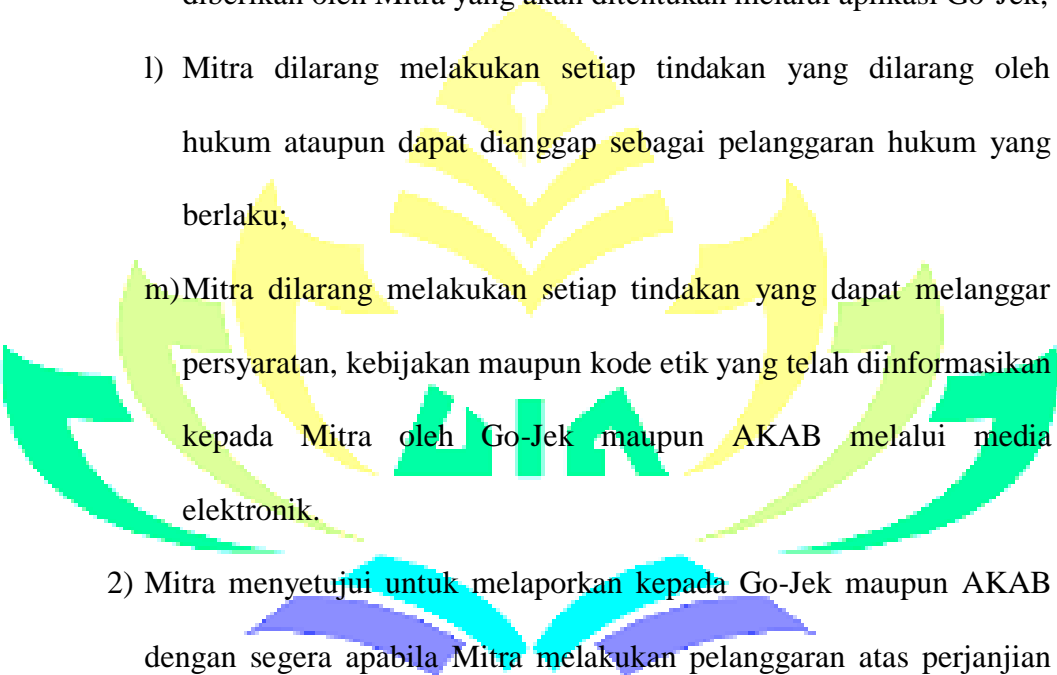
c. 4 Kode Etik dan Kewajiban Mitra

1) Dalam menyediakan jasa melalui aplikasi Go-Jek, Mitra setuju untuk mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Go-Jek maupun AKAB sebagai berikut :

- a) Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
- b) Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm Go-Jek yang dipinjamkan kepada Mitra oleh Go-Jek atas biaya yang dikenakan oleh Go-Jek .Go-Jek mempunyai hak untuk mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh Go-Jek;

¹⁴³ *Ibid.*

- c) Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan Go-Jek dan memelihara jaket dan helm yang disediakan Go-Jek;
- d) Mitra dilarang minum-minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba atau berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;
- e) Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
- f) Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukum pidana;
- g) Mitra dilarang baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, konsumen, dan/atau Mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
- h) Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik Go-Jek ataupun AKAB maupun konsumen, karyawan dan afiliasi dari Go-Jek dan AKAB;
- i) Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada konsumen melalui aplikasi Go-Jek selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh Go-Jek ataupun AKAB;

- 
- j) Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh Go-Jek ataupun AKAB;
- k) Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk tips kepada konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui aplikasi Go-Jek;
- l) Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku;
- m) Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada Mitra oleh Go-Jek maupun AKAB melalui media elektronik.
- 2) Mitra menyetujui untuk melaporkan kepada Go-Jek maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran perjanjian ini yang dilakukan oleh Mitra Go-Jek maupun AKAB, maka menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberlakukan oleh Go-Jek maupun AKAB yang telah diinformasikan oleh go-Jek kepada Mitra sebelumnya melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya.

- 3) Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, merupakan tanggung jawab Mitra.
- 4) Dengan ini Mitra menyetujui bahwa Go-Jek maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti diakibatkan penggunaan aplikasi Go-Jek. Mitra menyetujui bahwa Go-Jek maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, kerugian yang timbul karena penggunaan Mitra terhadap aplikasi Go-Jek atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan aplikasi Go-Jek.
- 5) Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada Go-Jek dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini maupun yang timbul dikarenakan pelanggaran Mitra terhadap Persyaratan.
- 6) Mitra menyetujui apabila Mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian ini maupun kode etik yang ditentukan oleh Go-Jek, Go-Jek mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Go-Jek, termasuk pembatasan dan penolakan akses Mitra kedalam akun Mitra dalam aplikasi Go-Jek.

Pengakhiran perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.¹⁴⁴

d. Keberlakuan Perjanjian

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal Mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir perjanjian ini. Apabila perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini, maka periode keberlakuan perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 tahun yang disebutkan pada awal pasal ini.
- 2) Go-Jek, AKAB maupun Mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini.
- 3) Dalam hal pengakhiran perjanjian ini, paling lambat 3 hari sejak berakhirnya perjanjian, Mitra wajib melunasi setiap jumlah-jumlah yang masih terhitung hutang Go-Jek, maupun pihak ketiga lainnya yang terkait tagihan ponsel pintar dan/atau uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra.
- 4) Mitra menyetujui dan mengetahui bahwa Go-jek, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai

¹⁴⁴ *Ibid.*

hak untuk menutup akses Mitra kepada akun yang dimilikinya dalam aplikasi Go-Jek dalam halnya perjanjian ini diakhiri.¹⁴⁵

B. Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan dengan Driver di Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung

Perjanjian kerjasama antara perusahaan Go-Jek dan Driver otomatis berlangsung ketika Driver mendaftarkan diri sebagai mitra Go-Jek. Dengan menjadi mitra Go-Jek, Driver harus menerima ketentuan dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek. Segala ketentuan atau kebijakan perusahaan Go-Jek terhadap drivernya dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan melalui perjanjian elektronik, yang disepakati oleh Driver melalui aplikasi yang dimiliki Driver Go-Jek tersebut.

Sistem bagi hasil antara perusahaan dan Driver Go-Jek adalah 80% : 20%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan Driver menerima bagian 80%. Bagi hasil antara perusahaan Go-Jek dan drivernya merupakan bagi hasil yang terjadi apabila Driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Layanan perusahaan Go-Jek yang berlaku di Bandar Lampung diantaranya Go-Ride, Go-Food, Go-Send, Go-Shop, Go-Mart, Sedangkan layanan perusahaan seperti Go-Tix, Go-Clean, Go-Glam, dll belum berlaku di Bandar Lampung. Jadi, layanan perusahaan Go-Jek yang dikenakan sistem bagi hasil yang berlaku di Bandar Lampung hanya 5 layanan tersebut.¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Wawancara, dengan Iif, Satgas Go-Jek, tanggal 12 Agustus 2018.

Menurut Reni, Sistem bagi hasil antara perusahaan Go-Jek dengan Driver memiliki ketentuan :¹⁴⁷

1. Tarif Minimal, maksudnya bagi hasil antara perusahaan dengan driver hanya berlaku di atas tarif minimal. Dalam Go-Jek harga tarif minimal tersebut sebesar Rp. 5.600. Jadi jika Driver mendapatkan orderan dibawah tarif minimal tersebut maka tidak dikenakan sistem bagi hasil. Tarif minimal tersebut berlaku dalam layanan Go-Ride dan Go-Send. Jadi jika Driver mendapatkan orderan Go-Ride dengan tarif sebesar Rp. 3.000, maka driver tidak dikenakan potongan malah saldo nya akan bertambah sebesar Rp. 2.600. Sedangkan bila Driver mendapatkan orderan dengan tarif di atas Rp.5.600, maka Driver akan mendapatkan potongan sebesar 20% dari harga tarif orderan tersebut. Misalnya, Driver mendapatkan orderan dengan tarif Rp.7.000 maka potongannya Rp.1.400, Rp.8.000 maka potongannya Rp.1.600, Rp.10.000 maka potongannya Rp.2.000, begitu seterusnya. Sedangkan Layanan Go-Send, sistem bagi hasilnya berlaku bila di atas tarif Rp.7.000, Driver yang mendapatkan orderan dengan tarif Rp.7.000 maka saldonya akan bertambah Rp.600. Dan tarif minimal dalam layanan Go-Send yaitu sebesar Rp.6.400, Bila Driver mendapatkan orderan Go-Send sebesar Rp.3.000 maka saldonya akan bertambah sebesar Rp.3.400, Rp.5.000 maka akan bertambah sebesar Rp.1.600. Dan bila Driver mendapatkan orderan Go-Send di atas Rp.7.000 maka potongannya sama seperti layanan Go-Ride yaitu sebesar 20% dari tarif yang didapat driver.

¹⁴⁷ Wawancara, dengan Reni, Karyawan Go-Jek, tanggal 11 Agustus 2018.

2. Layanan Go-Food, Go-Shop, Go-Mart tidak ada tarif minimal seperti Go-Ride dan Go-Send. Driver yang mendapatkan orderan dengan layanan tersebut maka akan dikenakan potongan sebesar 20%. Untuk layanan Go-Food, Go-Shop, Go-Mart harga tarif layanan minimal per antar ialah sebesar Rp.8.000.
3. Berlaku untuk semua layanan Go-Jek, Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan Driver berlaku untuk semua layanan yang ada di Go-Jek. Seperti layanan Go-Ride, Go-Send, Go-food, Go-Shop, Go-Mart, dll.

Kerjasama keuntungan bagi hasil dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Driver Go-Jek. Sedangkan untuk kerugian ditanggung sendiri oleh masing-masing pihak. Perusahaan tidak bertanggung jawab bila Driver mengalami kerugian kerusakan motor seperti, kecelakaan, kehilangan barang saat pengantaran, motor mogok, ban bocor, dll. Menurut perusahaan itu merupakan tanggung jawab Driver sebagai mitra Go-Jek.

Menurut Angga, Dalam hal modal untuk menunjang pekerjaan Driver sebagai Mitra Go-Jek harus menyiapkan Motor dalam keadaan baik (rutin servis), menyiapkan kuota Internet untuk menjalankan aplikasi Driver, Menyiapkan pulsa untuk menghubungi customer.¹⁴⁸

Menurut Denny, penghasilan menjadi Driver ditentukan dengan berapa orderan yang didapatkan tiap harinya. Dan bonus yang diberikan oleh

¹⁴⁸ Wawancara, dengan Angga, Driver Go-Jek, tanggal 22 Agustus 2018.

perusahaan kepada Driver yang ditentukan bila Driver mampu memenuhi target poin tertentu.¹⁴⁹

Menurut Aldo, juga bahwa penghasilan Driver Go-Jek juga bisa naik turun sesuai kemampuan ia mendapatkan dan menyelesaikan orderan serta bonus yang ia dapatkan. Adakalanya order dirasa sepi sehingga tak cukup untuk mendapatkan bonus harian dan juga faktor fisik yang tak selamanya sehat bisa mengambil order terus menerus.¹⁵⁰

Menurut Emil, Driver dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Driver Go-Jek harus mempunyai target poin dalam sehari, agar memperoleh bonus dari perusahaan.¹⁵¹ Berikut perhitungan poin dasar yang akan didapatkan

Driver Go-Jek :

1. Layanan Go-Ride = 1 Poin
2. Layanan Go-Send = 1 Poin
3. Layanan Go-Food = 2 Poin
4. Layanan Go-Shop = 1 Poin
5. Layanan Go-Mart = 2 Poin

Menurut Tama, perhitungan bonus dan poin untuk Driver Go-Jek setiap daerah berbeda-beda, Berikut perhitungan poin dan bonus Go-Jek wilayah Bandar Lampung :¹⁵²

1. 14 poin = Rp.15.000
2. 18 poin = Rp.30.000

¹⁴⁹ Wawancara, dengan Denny, Driver Go-Jek, tanggal 22 Agustus 2018.

¹⁵⁰ Wawancara, dengan Aldo, Driver Go-Jek, tanggal 21 Agustus 2018.

¹⁵¹ Wawancara, dengan Emil, Satgas Go-Jek, tanggal 12 Agustus 2018.

¹⁵² Wawancara, dengan Tama, Driver Go-Jek, tanggal 20 Agustus 2018.

3. 22 poin = Rp.40.000

4. 26 poin = Rp.35.000

5. 30 poin = Rp.40.000

Menurut Bimo, dalam satu hari menyelesaikan orderan dengan total 30 poin, bonus dari perusahaan Go-Jek maksimal yang bisa didapatkan ialah sebesar Rp.160.000 perhari.¹⁵³

Menurut Eky, dengan adanya sistem bagi hasil antara Driver dengan perusahaan ini, menurutnya ia harus mengejar target poin dan mendapatkan bonus dari perusahaan. Karena menurutnya setiap orderan yang ditentukan dikenakan sistem bagi hasil maka penghasilannya berkurang 20% untuk perusahaan. Jadi Driver harus mendapatkan bonus untuk mendapatkan keuntungan lebih.¹⁵⁴

¹⁵³ Wawancara, dengan Bimo, Driver Go-Jek, tanggal 21 Agustus 2018.

¹⁵⁴ Wawancara, dengan Eky, Driver Go-Jek, tanggal 21 Agustus 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan dengan Driver

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Dimana dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara perusahaan Go-Jek dan Driver dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian kerjasama di awal Driver menjadi mitra Go-Jek. Dan begitu pula mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Untuk keuntungan yang telah disepakati oleh perusahaan dengan Driver, dimana isi perjanjian yang telah dikemukakan oleh perusahaan ialah :

“Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen untuk penggunaan aplikasi Go-Jek, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai).”

Dimana sistem bagi hasil antara perusahaan dengan Driver, pembagian keuntungannya berdasarkan persentase yaitu sebesar 20% : 80%. Dan untuk kerugian, isi perjanjian yang telah dikemukakan oleh perusahaan ialah :

7) Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, merupakan tanggung jawab Mitra.

8) Dengan ini Mitra menyetujui bahwa Go-Jek tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti diakibatkan penggunaan aplikasi Go-Jek. Mitra menyetujui bahwa Go-Jek maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, kerugian yang timbul karena penggunaan Mitra terhadap aplikasi Go-Jek atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan aplikasi Go-Jek.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kerjasama sistem bagi hasil antara perusahaan dengan Driver Go-Jek yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dalam pembagian hasil keuntungan telah sesuai dalam pelaksanaannya, antara teori dan prakteknya. Hasil pendapatan Driver Go-Jek telah dibagi secara proporsional kepada pihak perusahaan Go-Jek.

Dalam pengertian akad *mudharabah*, keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan bila mengalami kerugian maka akan ditanggung pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sedangkan dalam pengertian akad *musyarakah*, bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan,

kerugian ditanggung bersama secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Dengan demikian, dalam akad *syirkah* ini antar pihak tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan dalam kerugian ia dibebaskan.

Dalam sistem bagi hasil antara perusahaan Go-Jek dan Driver, keuntungan telah sesuai dengan prinsip bagi hasil, namun dalam hal kerugian pihak perusahaan Go-Jek seolah-olah tidak bertanggung jawab bila Driver mengalami kerugian. Itu bertentangan dengan prinsip bagi hasil, yaitu apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi bersama sesuai kesepakatan dan bila mendapatkan kerugian akan ditanggung bersama.

Sistem bagi hasil antara perusahaan Go-Jek dan Driver ini dapat digolongkan dalam *musyarakah* dengan sistem bagi hasil. Digolongkan dalam *musyarakah* karena terdapat pihak-pihak yang bekerjasama yaitu pihak perusahaan Go-Jek dan Driver yang melakukan suatu bisnis. Dalam sistem bagi hasil ini jelas di awal kesepakatan menggunakan kontrak kerjasama elektronik yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya kontrak kerjasama di awal kesepakatan kerjasama ini kedua belah pihak jelas dan tidak keliru dalam menjalankan kerjasama. Sehingga dengan adanya kejelasan di awal kerjasama dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam bekerjasama antar pihak.

Sistem persentase bagi hasil dalam kerjasama ini dapat digolongkan menggunakan konsep *mudharabah*, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Dalam rukun *mudharabah*

tentang nisbah keuntungan, keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu. Dalam hal ini telah sesuai dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan dengan Driver, yaitu sistem bagi hasilnya berdasarkan persentase 20% untuk perusahaan Go-Jek dan 80% untuk Driver.

Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan Driver ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam sistem kerjasama bagi hasil. Dimana pembagian keuntungan telah dibagi secara proporsional antara kedua belah pihak, namun dalam hal kerugian seharusnya kedua belah pihak menanggung bersama-sama bila terjadi kerugian.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan dengan Driver di Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan kerjasama. Apabila para pihak itu telah menentukan bentuk dan isi kerjasama, maka kerjasama itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus melaksanakan segala hak dan kewajibannya, dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam melakukan kerjasama, para pihak diharuskan untuk mengikuti aturan syariat Islam.

Sistem kerjasama bagi hasil antara perusahaan dengan Driver dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama dan tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa dan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan

kerjasama yang baik, saling menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, sebagai berikut :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

Artinya : ...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya...”

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami secara global bahwa Allah SWT, memerintahkan manusia untuk tolong menolong dalam berusaha dan bekerja baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Dan memerintahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak benar yang menimbulkan dosa bagi dirinya sendiri.

Para pelaku bisnis Muslim, diharuskan untuk berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang membahayakan dan merugikan orang lain, atau malah merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam dunia perserikatan. Sebagaimana Islam juga memperingatkan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain, merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam.

Dalam Hukum Islam terdapat berbagai macam akad bagi hasil termasuk didalamnya *mudharabah* dan *musyarakah*. *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak yang pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) sebagai pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional sampai batas modal masing-masing.

Keterkaitan akad *syirkah* dengan sistem bagi hasil yang dilakukan antara perusahaan dengan Driver memiliki persamaan yaitu pihak-pihak berkontribusi untuk melakukan usaha secara bersama. Pihak perusahaan berkontribusi modal menyediakan aplikasi Go-Jek untuk para Driver, Sedangkan Driver berkontribusi modal menyediakan Motor dalam keadaan baik (rutin servis), menyiapkan kuota Internet untuk menjalankan aplikasi Driver, Menyiapkan pulsa untuk menghubungi customer.

Namun dalam pengertian akad *syirkah* tersebut, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan

dengan Driver dalam hal keuntungan telah sesuai dalam teori dan prakteknya, dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Namun dalam hal kerugian, tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh Driver saja, misalnya saja Driver mengalami kecelakaan, dan motor mogok ketika sedang mengantar customer. Perusahaan berdasarkan isi perjanjian kerjasama, tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Driver. Itu bertentangan dengan Hukum Islam, dalam kerjasama bila memperoleh keuntungan maka akan dibagi bersama dan bila mendapatkan kerugian akan ditanggung bersama.

Agama Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bidang muamalah tidak semata-mata mendapatkan keuntungan, tapi juga mencari ridha Allah SWT. Berdasarkan dari penjabaran tentang sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan dengan Driver, dalam hal keuntungan telah sesuai dengan hukum Islam, namun dalam hal kerugian seharusnya para pihak menanggung bersama, dan tidak membebankan kerugian terhadap salah satu pihak saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Sistem bagi hasil antara perusahaan dan driver Go-Jek adalah 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver menerima bagian 80%. Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver adalah bagi hasil dalam hal keuntungan saja. Sementara jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sendiri oleh driver dan tidak ada pertanggung jawaban dari perusahaan.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung, belum sesuai dengan hukum Islam khususnya yang terkait dalam syarat-syarat akad *syirkah*, dimana bahwa keuntungan dan kerugian dibagi secara bersama-sama. Sebagaimana yang terjadi dilapangan tidak sesuai praktiknya.

B. Saran-Saran

1. Sistem bagi hasil antara perusahaan Go-Jek dengan Driver berbasis online seharusnya didasarkan akad-akad yang sesuai dengan Hukum Islam. Dalam sistem bagi hasilnya seharusnya tidak hanya keuntungan saja yang dibagi secara proporsional, namun kerugian juga harus ditanggung bersama-sama.
2. Diharapkan di dalam isi perjanjian kerjasama dijelaskan nominal persentase bagi hasilnya.
3. Prinsip kejujuran dan keadilan haruslah ditingkatkan dalam menjalin kerjasama.
4. Bagi Driver diharapkan lebih bijak lagi dalam menyetujui isi perjanjian kerjasama yang dibuat oleh perusahaan, agar semua pihak mendapatkan keuntungan yang sepadan dan tidak mendapatkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh al-Madzhab Al-Ar Baah*, Juz 11, Tiariyah Qubra, Mesir.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.

Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut : Darul Akhyar, 773 H-852 H.

-----, *Tarjamah Bulughul Maram*, Muh Rifai, Semarang: Wicaksana, 1990.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT.Rajagrafindo, 2016.

Arif , Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta : Kencana, 2007.

Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Consuelo, G.sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI-Press, 1993.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

Daud, Muhammad, *Hukum Islam*, Surakarta : Gramedia, 2001.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta : Kencana, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : Jabal, 2010.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).

Hasan , M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, Jilid V, Maktabah Ar-Riyadh al-Hadithsah, Riyadh, tt.

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayuasa, 1992.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

- Lubis, Sahrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Mas'adi, Ghufon A, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1998.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, 1969.
- Munawwar, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Kropyak, 1993.
- Muslaehuiddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Musthafa Diib, Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir cet 1.
- Mustofa, Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.

Remy, Sutan Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2014.

Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad*, Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syari’ah IAIN RIL., Vol.XII, No. 3, Juni 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Alih Bahasa, Kamaludin A. Marzuki, Semarang: Al-ma’arif, 1970.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014.

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

-----, dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Syaikh al-‘Allamah Muhammad bi Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2016.

Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, Damaskus:

Dar Al-Fikr, tt.

Syamsuddin, Ahmad Ar-Ramli, *Nihayah Al-muhtaj*, Juz 5, Damaskus: Dar Al-Fikr, tt.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 1, Surabaya: Dar Al-Ilmi, tt.

Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, Jakarta: Lembaga penerbit FEUI.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, Juz 4, Damaskus: Darul Al-Fikr, 1989.

Sumber Lainnya

Aplikasi Driver Go-Jek

<http://www.abuaabdurrohmanmanado/>, diakses 10 Mei 2018.

Wikipedia, Pengertian Perusahaan Gojek Dan Driver, <http://www.wikipedia/>, diakses 9 Mei 2018.

<http://go-jek.com/sejarah-berdirinya-gojek>, diakses 25 Agustus 2018.

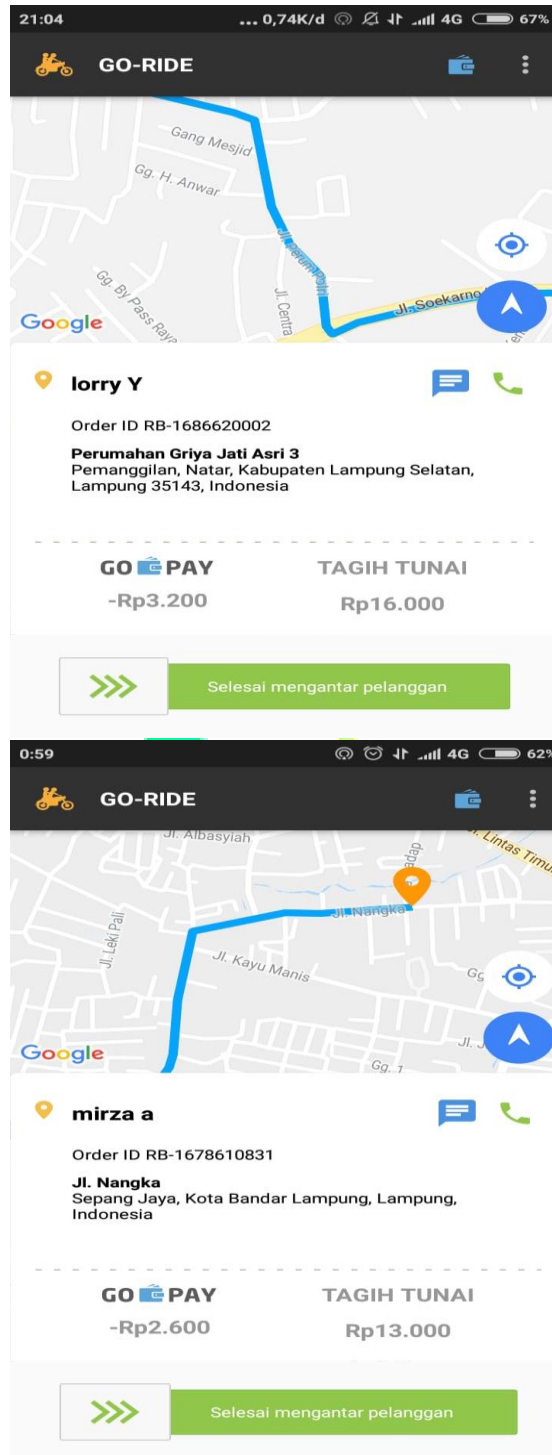
[http:// bit.ly/alamat gojek](http://bit.ly/alamat_gojek), diakses tanggal 25 Agustus 2018.

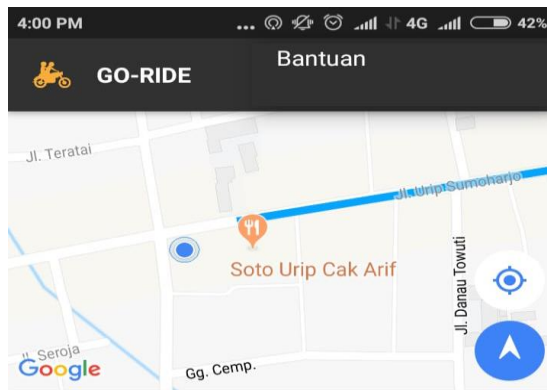
[http://googleweblight.com/?lite_url,http://serviceexcelencegojek.blogspot.co.id](http://googleweblight.com/?lite_url=http://serviceexcelencegojek.blogspot.co.id),

diakses tanggal 25 Agustus 2018.

Contoh Bagi Hasil

Go-Ride





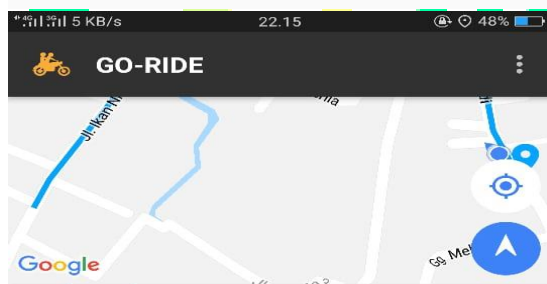
hendra

Order ID RB-1654489197

Jalan Pulau Ternate
Jl. Pulau Ternate, Jagabaya II, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

GO PAY Rp600	TAGIH TUNAI Rp5.000
------------------------	-------------------------------

>>> Selesai mengantar pelanggan

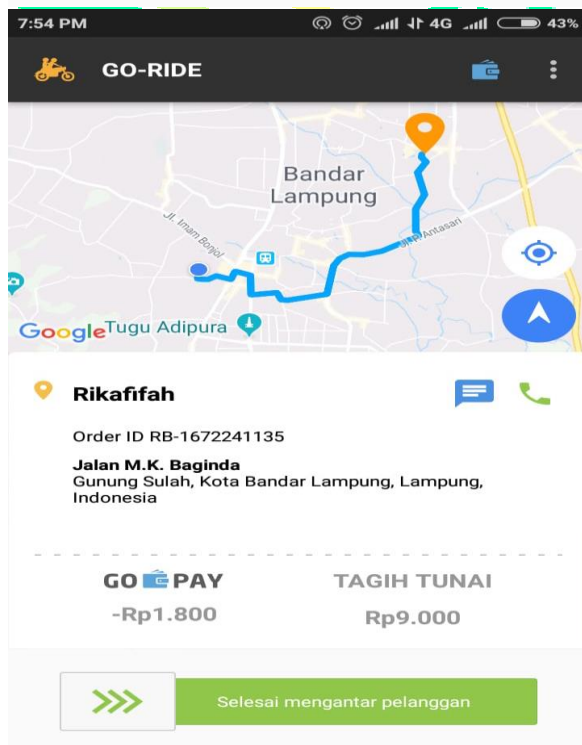
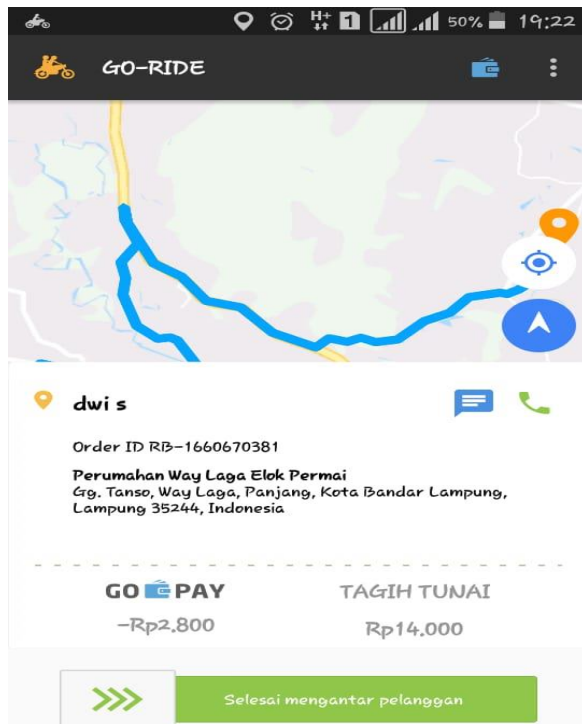


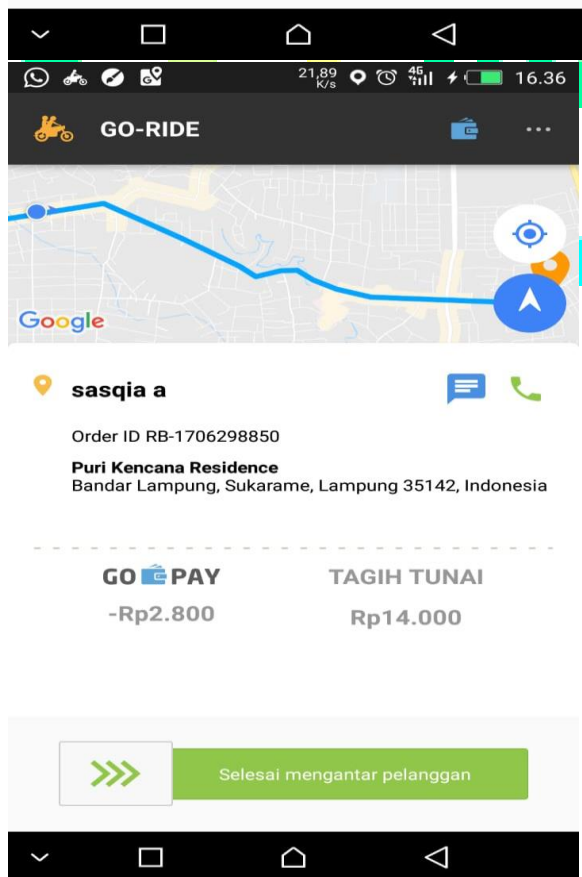
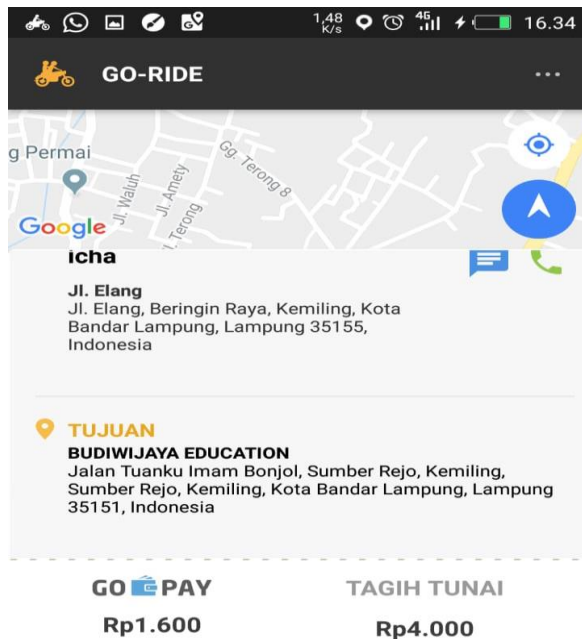
Ketut K
Nasi Besek Lampung
I, Jl. Slamet Riyadi No.24, Sukaraja, Tlk. Betung Sel., Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

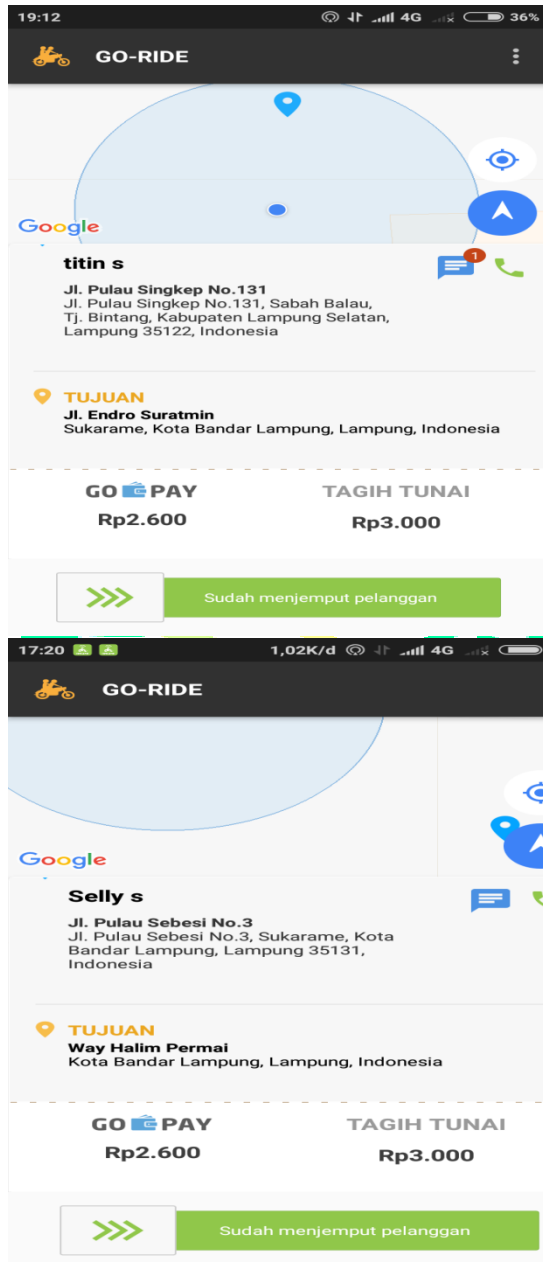
TUJUAN
Toro Guest House
Pengajaran, Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214, Indonesia

GO PAY -Rp1.600	TAGIH TUNAI Rp8.000
---------------------------	-------------------------------

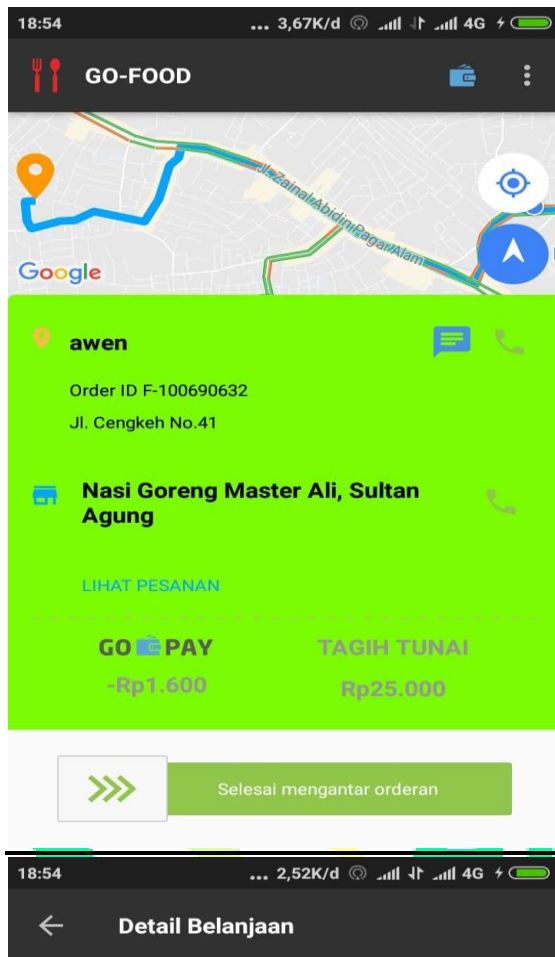
>>> Sudah menjemput pelanggan







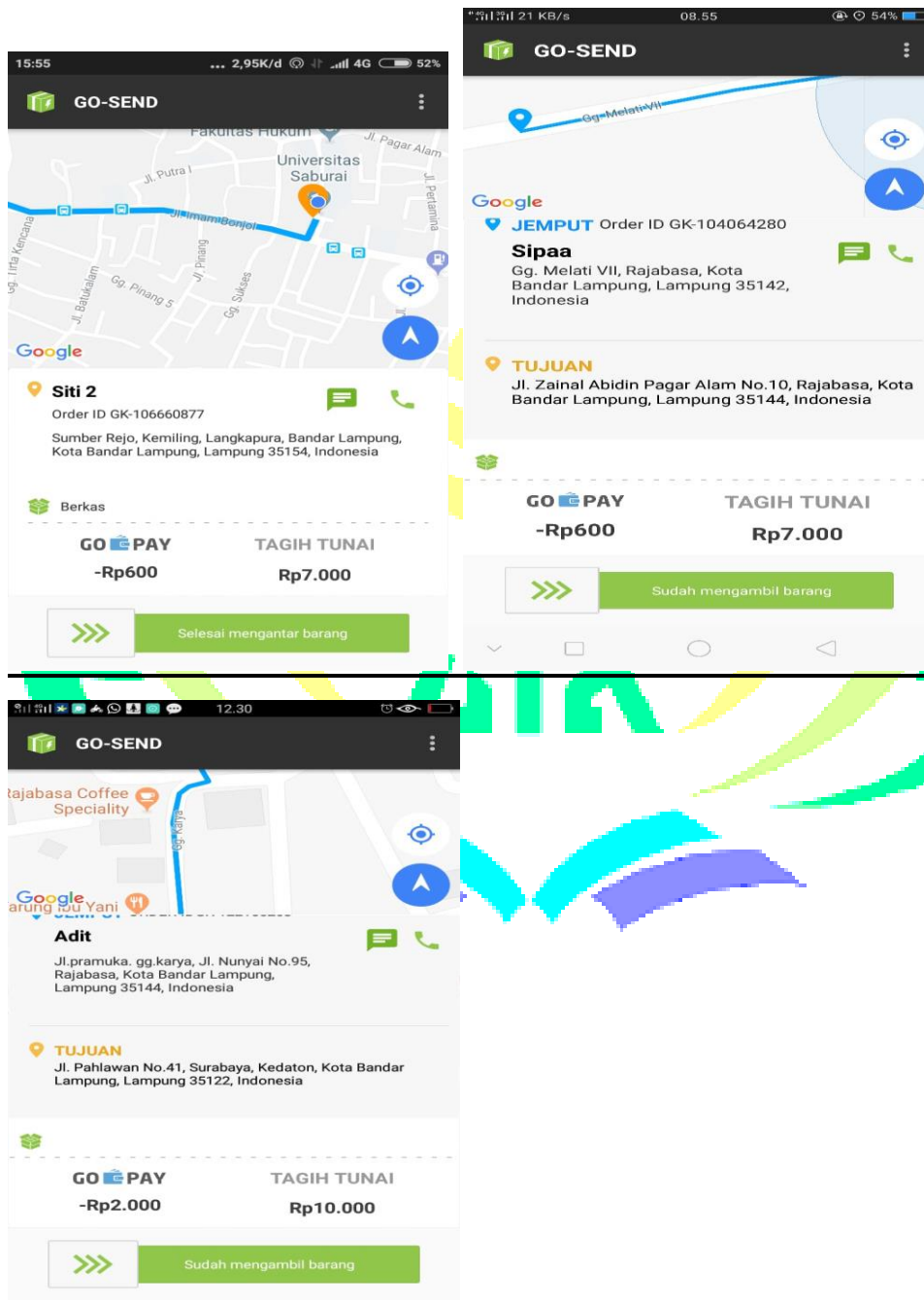
Go-Food



[DOTMOD enabled]
Go Jek will stay awake



Go-Send



Go-Shop

